



**2017**

# INDIKATOR EKONOMI

*Kabupaten Sidoarjo*



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN SIDOARJO

## KATA PENGANTAR

**P**ublikasi Indikator Ekonomi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 ini dibuat untuk memberikan gambaran beberapa indikator ekonomi utama Kabupaten Sidoarjo. Indikator tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu acuan bahan perencanaan pembangunan dan juga seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan, memonitor dan melakukan evaluasi terhadap prioritas pembangunan perekonomian daerah.

Publikasi ini menyajikan analisis data kuantitatif dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan perkapita, Inflasi, Gini Rasio, Pendapatan dan Belanja Daerah serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sidoarjo.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan publikasi ini. Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penerbitan buku ini, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan publikasi untuk masa selanjutnya. Harapan kami, semoga publikasi ini berguna bagi semua pihak dan memberikan nilai tambah dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo.

Sidoarjo, Agustus 2017

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Sidoarjo

**Drs. Y. SISWOJO**  
NIP. 19590722 198501 1 003

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
Kata Pengantar	I
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Grafik	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Umum	1
1.2. Target Indikator Utama Pembangunan	2
1.3. Tujuan Penulisan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II. METODOLOGI INDIKATOR PEREKONOMIAN	8
2.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	8
2.2. Pertumbuhan Ekonomi	9
2.3. PDRB Perkapita	10
2.4. Laju Inflasi	11
2.5. Indeks Gini	12
2.6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	14
2.7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	15
BAB III. INDIKATOR PARADIGMA PEMBANGUNAN EKONOMI	18
3.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sidoarjo 2012 - 2016	18
3.2. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 - 2016	21
3.3. Struktur Perekonomian	24

3.4. PDRB Perkapita	26
3.5. Laju Inflasi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 – 2016	28
3.6. Indeks Gini	30
3.7. Realisasi Anggaran dan Belanja Pemerintah Daerah	31
3.8. Indeks Pembangunan Manusia	34
BAB IV. PENUTUP	39
LAMPIRAN	41

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 3.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku 2014 – 2016 (juta rupiah)	18
Tabel 3.1.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2014 – 2016 (juta rupiah)	19
Tabel 3.2.1. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sidoarjo 2014 – 2016 (persen)	21
Tabel 3.4.1. Perbandingan PDRB dan PDRB Perkapita (ADHB) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 - 2016	27
Tabel 3.5.1. Laju Inflasi <i>Year on Year</i> (yoy) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 – 2016	29
Tabel 3.7.1. Realisasi Pendapatan dan Pengeluaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 - 2016	32
Tabel 3.8.1. Angka Harapan Hidup (e0) Penduduk Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 - 2015	35
Tabel 3.8.2. Angka Harapan Hidup (e0) Penduduk Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 - 2015	35
Tabel 3.8.3. Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Bersekolah di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 - 2016	36
Tabel 3.8.4. IPM Metode Baru dan Komponennya di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016	37
Tabel 3.8.5. Posisi Angka IPM Metode Baru Kabupaten Sidoarjo Dibandingkan Beberapa Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2016	37

## DAFTAR GRAFIK

### Halaman

Grafik 3.1.1.	Perbandingan Sektoral PDRB Kabupaten Sidoarjo Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2014 - 2016	20
Grafik 3.3.1.	Persentase PDRB Kabupaten Sidoarjo Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016 (persen)	25
Grafik 3.4.1.	Perbandingan Pertumbuhan PDRB dan PDRB Perkapita (ADHK) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 - 2016	28
Grafik 3.5.1.	Inflasi Bulanan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 - 2016	30
Grafik 3.6.1.	Perbandingan Gini Rasio Kabupaten Sidoarjo dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 - 2015	31
Grafik 3.7.1.	Struktur Anggaran Belanja Terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 - 2016	34

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Umum**

Pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengarahkan pembagian pendapatan masyarakat yang semakin merata, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan usaha menggeser (peranan) dari kegiatan yang dominan di sektor primer ke sektor sekunder dan tersier.

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Sidoarjo agar lebih terarah dan berhasil guna serta berdaya guna, maka pemerintah bersama-sama masyarakat telah menetapkan visi, misi dan strategi dalam mencapai tujuan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2020. Visi dan misi tersebut tentu saja bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat di Sidoarjo dan bukan hanya menyentuh wilayah maupun kelompok masyarakat tertentu.

RPJP Daerah Kabupaten Sidoarjo mempunyai kedudukan sebagai kerangka dasar pengelolaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran kehendak masyarakat setempat dan berfungsi sebagai arah serta pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pemberian pelayanan masyarakat bagi semua pihak di Kabupaten Sidoarjo. Agenda dan prioritas pembangunan yang telah disusun dan dirancang di dalam RPJMD akan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan saat ini maupun tahun mendatang. Pada akhirnya pembangunan yang telah dilaksanakan akan mewujudkan kemakmuran bersama serta tidak boleh ada yang terpinggirkan dari proses dan hasil pembangunan.

Untuk mewujudkan program/ kegiatan perencanaan yang sesuai dengan visi, misi dan strategi pembangunan Kabupaten Sidoarjo, sangat diperlukan dukungan data



statistik yang akurat, lengkap dan terkini. Data statistik tersebut akan menjadi suatu instrumen yang sangat berguna untuk memonitor proses pembangunan yang sedang berjalan maupun sebagai alat evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur telah melakukan kristalisasi terhadap lebih dari seratus indikator pembangunan yang tertuang dalam PP No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi 5 (lima) indikator pembangunan utama. Lima Indikator Pembangunan Utama tersebut meliputi 2 (dua) indikator sosial (pengangguran terbuka dan persentase penduduk miskin), 3 (tiga) indikator pembangunan ekonomi (Pertumbuhan ekonomi dan indeks disparitas wilayah) serta 1 (satu) indikator sosial ekonomi (Indeks Pembangunan Manusia).

Pemilihan 5 (lima) Indikator Pembangunan Utama tersebut dimaksudkan untuk lebih memudahkan para perencana pembangunan dan juga seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan, memonitor dan melakukan evaluasi terhadap prioritas pembangunan berdasarkan indikator yang relatif lebih ringkas namun tetap komprehensif. Selain itu, kristalisasi indikator utama pembangunan tersebut akan mampu membuat keterbandingan antar waktu dan antar wilayah.

## **1.2. Target Indikator Utama Pembangunan Ekonomi**

Sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan, maka sangat penting dan perlu untuk menyajikan angka-angka dari masing-masing indikator utama tersebut sebagai target yang akan dicapai. Penentuan target tersebut juga akan menjadi landasan evaluasi bagi para seluruh pemangku kepentingan terhadap pembangunan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Sidoarjo.

### **1.2.1. Produk Domestik Regional Bruto**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode



tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan (riil).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ini menyajikan angka-angka periodik, yang masing-masing disusun menurut lapangan usaha, baik atas dasar harga berlaku (*Curent Prices*) maupun atas dasar harga konstan (*Constant Prices*).

PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (riil) disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

PDRB disajikan secara berkala dirinci menurut lapangan usaha atau sektoral, serta jenis penggunaannya atas dasar harga berlaku dan atas harga konstan pada tahun dasar tertentu. Dalam hal ini, tahun dasar terbaru yang digunakan adalah tahun 2010. Dengan menggunakan tahun dasar (Tahun 2010), artinya pertumbuhan ekonomi yang terjadi benar-benar berasal dari perkembangan produksinya saja karena faktor harga telah dihilangkan dengan cara mengacu pada harga pada satu titik tahun dasar (harga tahun 2010).

### 1.2.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan wilayah, khususnya pembangunan bidang ekonomi merupakan serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja, menciptakan pembagian pendapatan masyarakat yang semakin merata dan meningkatkan hubungan ekonomi wilayah. Untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas agar mampu memberikan hasil-hasil pembangunan yang dapat dinikmati semua lapisan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses terjadinya peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara riil. PDRB atas dasar harga konstan (riil) disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka akan semakin besar penciptaan kue pembangunan. Dengan kebijakan terpadu, holistik dan *pro-poor*, maka kue pembangunan tersebut akan bisa dinikmati seluruh lapisan masyarakat.

Rancangan program yang dicanangkan para pemangku kebijakan yang bersinergi dengan pelaku ekonomi di Sidoarjo untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui program-program pembangunan yang sesuai dengan RPJMD Tahun 2016-2020 meliputi:

1. Peningkatan daya saing sektor UMKM dan koperasi.

Peningkatan daya saing sektor UMKM dan koperasimerupakan langkah strategis. Kedua sektor ini memiliki peran besar untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta pada penciptaan lapangan kerja baru. Peningkatan daya saing kedua sektor ini diharapkan akan menjadi motor untuk peningkatan potensi dan daya saing . Adapun program yang dilakukan diantaranya adalah peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan program pengembangan industri kecil dan menengah.

2. Peningkatan pertumbuhan sektor industri, perdagangan, jasa, dan pertanian berbasis agrobis.

Beberapa program untuk memacu pertumbuhan sektor-sektor yang menjadi andalan Kabupaten Sidoarjo antara lain:

- Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri dengan beberapa indikator meningkatnya pelaku usaha perdagangan, meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor perdagangan serta meningkatnya nilai ekspor daerah.
- Program peningkatan pasar dengan mendorong lebih banyak pedagang yang menempati pasar-pasar yang ada.

- Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
- Program peningkatan produksi peternakan dan hasil peternakan.
- Program pengembangan perikanan tangkap
- Program pengembangan destinasi pariwisata
- Program pengembangan kemitraan
- Program pengembangan pemasaran pariwisata

### 1.2.3. Indeks Gini

Hasil-hasil pembangunan harus bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara merata. Kondisi ini bisa diartikan bahwa proses pembangunan harus dilakukan secara merata di semua wilayah sehingga terjadi peningkatan pendapatan perkapita yang relatif merata pula. Namun demikian, adanya perbedaan posisi geografis, sumber daya maupun sarana dan prasarana antar wilayah menyebabkan masih adanya ketimpangan/disparitas dari percepatan pembangunan yang terjadi. Konsentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi di daerah tertentu mapun rendahnya tingkat mobilitas faktor-faktor produksi juga merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan antardaerah.

Ketimpangan perkembangan pembangunan antar wilayah yang berdampak pada tidak meratanya peningkatan pendapatan perkapita masyarakat perlu untuk segera ditanggulangi. Kebijakan yang berkaitan dengan alokasi sumberdaya, kemudahan mobilisasi faktor-faktor produksi sehingga terjadi distribusi pendapatan yang lebih baik harus terprogram secara tepat untuk mengurangi adanya disparitas antar wilayah. Program, kebijakan maupun strategi pembangunan juga harus lebih mempertimbangkan kondisi kewilayahan untuk lebih mendapatkan hasil pendistribusian pendapatan yang lebih merata.

Salah satu indikator untuk memperoleh informasi mengenai tingkat distribusi pendapatan masyarakat adalah Indeks Gini (*Gini Ratio*). Indeks Gini ini akan menghasilkan angka indeks yang lebih besar atau sama dengan nol dan

lebih kecil dari satu. Semakin tinggi Indeks Gini berarti distribusi pendapatan semakin rendah dan begitupun sebaliknya semakin rendah Indeks Gini maka akan semakin tidak merata distribusi pendapatan di wilayah tersebut.

#### 1.2.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, bukan alat dalam proses pembangunan. Pembangunan manusia ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam semua proses dan kegiatan pembangunan. Dalam kaitannya dengan pembangunan manusia, makna pembangunan suatu perubahan masih relevan jika diartikan sebagai perubahan yang terjadi pada manusia, dilihat dari sisi ekonomi dan sosial. Dengan mengamati perubahan atau perkembangan manusia dari sisi ekonomi dan sosial, maka dapat dijadikan sebagai Indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan program-programnya.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) merupakan indeks komposit sederhana yang menjelaskan bagaimana penduduk suatu wilayah dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Sebagai alat ukur tunggal dan sederhana, IPM sangat cocok sebagai alat ukur kinerja pembangunan, khususnya pembangunan manusia yang dilakukan di suatu wilayah pada waktu tertentu atau secara lebih spesifik IPM merupakan alat ukur kinerja dari pemerintahan suatu wilayah.

### 1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan Indikator Perekonomian Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 ini sebagai upaya memberikan fakta empiris pembangunan di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2016. Berbagai program dan strategi pembangunan telah diformulasikan dan diimplementasikan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama masyarakat dan

seluruh pemangku kepentingan. Tujuan pembangunan terutama pembangunan ekonomi yang pada hakikatnya adalah menciptakan masyarakat yang makmur merupakan amanat yang diemban oleh seluruh pemangku kepentingan terutama pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Dalam publikasi ini akan dipaparkan berbagai indikator pembangunan terutama pembangunan ekonomi yang merupakan agenda pemabangunan Kabupaten Sidoarjo yaitu PDRB, pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, distribusi pendapatan dan beberapa indikator lainnya.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Publikasi Indikator Perekonomian Kabupaten Sidoarjo disusun menjadi 3(lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bab I. memuat uraian umum mengenai indikator kinerja utama perekonomian Kabupaten Sidoarjo serta tujuan penulisan dan sistematika penulisan.
2. Bab II. memuat konsep dan definisi mengenai indikator makro ekonomi.
3. Bab III. memuat capaian indikator kinerja pembangunan ekonomi.
4. Bab IV. memuat indikator tujuan strategis pembangunan ekonomi dengan ulasan beberapa indikator terkait APBD dan pembangunan sektoral.
5. Bab V. Kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **METODOLOGI INDIKATOR PEREKONOMIAN**

#### **2.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Salah satu indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu wilayah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut definisinya, PDRB adalah total nilai barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu tanpa melihat faktor kepemilikan. Jadi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara Agregatif menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan/ balas jasa kepada faktor-faktor produksi di daerah tersebut, atau merupakan "*PRODUCTION ORIGINATED*".

Di dalam PDRB disebutkan bahwa nilai barang dan jasa adalah yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya tahunan atau triwulanan). Rebasing (pergeseran tahun dasar terakhir) adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB Indonesia dari tahun 2000 ke 2010. Perubahan tahun dasar PDB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 System of National Accounts (SNA 2008) melalui penyusunan kerangka Supply and Use Tables (SUT). Uraian lapangan usaha yang disajikan dalam 17 kategori lapangan usaha, yaitu :

1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
2. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri Pengolahan
4. Pengadaan Listrik dan Gas
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang
6. Konstruksi
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
8. Transportasi dan Pergudangan
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
10. Informasi dan Komunikasi

11. Jasa Keuangan dan Asuransi
12. Real Estat
13. Jasa Perusahaan
14. Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
15. Jasa Pendidikan
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
17. Jasa Lainnya

PDRB disajikan dalam dua dasar penghitungan:

- a. Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), yaitu penyajian PDRB yang menggambarkan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun berjalan. Dalam melihat struktur ekonomi suatu wilayah, biasanya digunakan PDRB atas dasar harga berlaku.
- b. Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), yaitu penyajian PDRB yang menggambarkan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu (disebut tahun dasar). Mulai tahun 2005 penghitungan PDRB atas dasar harga konstan yang didasarkan pada harga-harga tahun 2000. Karena menggunakan harga konstan (tetap), maka perkembangan agregat dari tahun ke tahun semata-mata disebabkan perkembangan riil dari kuantum produksi dan sudah tidak mengandung fluktuasi harga (inflasi/deflasi). Dengan penyajian ADHK ini, pertumbuhan riil ekonomi dapat dihitung.

## **2.2. Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan 2010**

Pertumbuhan PDRB diperoleh dari pengolahan indeks berantai PDRB atas dasar harga konstan 2010. Indeks berantai tersebut merupakan hasil pembagian nilai PDRB masing-masing tahun dengan nilai PDRB pada tahun sebelumnya. Apabila angka indeks ini dikalikan dengan 100, dan hasilnya dikurangi 100, maka akan didapatkan nilai yang menunjukkan tingkat agregat pertumbuhan ekonomi masing-masing tahun.

Penghitungan pertumbuhan ekonomi masing-masing tahun dirumuskan sebagai berikut:



$$PE = IB - 100 = \left[ \frac{PDRB_t}{PDRB_{t-1}} \times 100 \right] - 100$$

Dimana:

<i>PE</i>	= Pertumbuhan Ekonomi
<i>IB</i>	= Indeks berantai masing-masing tahun
<i>PDRB<sub>t</sub></i>	= PDRB tahun ke- t
<i>PDRB<sub>t-1</sub></i>	= PDRB tahun ke- t-1

### 2.3. PDRB Perkapita

PDRB perkapita adalah PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Besaran ini dipengaruhi oleh jumlah penduduk pertengahan tahun, dalam arti bahwa semakin besar jumlah penduduk akan semakin kecil besaran PDRB perkapita wilayah tersebut. Semakin tinggi PDRB perkapita suatu wilayah semakin baik tingkat perekonomian wilayah tersebut, walaupun ukuran ini tidak dapat memperlihatkan kesenjangan pendapatan antar penduduk.

Meskipun terdapat keterbatasan, Indikator PDRB perkapita ini cukup memadai untuk mengetahui tingkat perekonomian suatu wilayah dalam lingkup makro, paling tidak sebagai acuan memantau kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan produk domestik barang dan jasa di wilayah tersebut.

Dalam rangka mengakomodir rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai tahun dasar yang digunakan dalam penghitungan PDB/PDRB dan melaksanakan kesepakatan bersama maka mulai tahun 2014 penyusunan PDRB Kabupaten Sidoarjo menggunakan tahun 2010 sebagai tahun dasar baru.

PDRB perkapita umumnya disajikan atas dasar harga berlaku yang dirumuskan sebagai berikut:

$$PDRB \text{ per Kapita} = \frac{PDRB_{ADHB}}{\text{Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun}}$$

Peningkatan PDRB perkapita atas dasar harga berlaku ini masih memiliki keterbatasan, yaitu belum menunjukkan peningkatan sebenarnya dari daya beli perkapita karena beberap[a hal sebagai berikut:

- a. PDRB perkapita masih belum dapat mendeteksi kesenjangan penguasaan aset dan penerimaan balas jasa faktor produksi. Angka ini baru memberi petunjuk rata-rata pendapatan perkapita suatu wilayah.
- b. Tingkat kenaikan harga masih ada di dalamnya.
- c. Tingkat pertumbuhan penduduk juga masih berpengaruh.

#### 2.4. Laju Inflasi

Inflasi adalah suatu keadaan dalam perekonomian ketika terjadi kenaikan harga-harga barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga. Kenaikan harga-harga ini dapat terjadi karena kuatnya permintaan masyarakat (*demand pull inflation*), meningkatnya biaya produksi secara terus menerus (*cost push inflation*) atau karena perilaku permintaan dan penawaran tidak seimbang.

Naik turunnya harga ini dipantau secara mingguan, dua mingguan dan bulanan berdasarkan paket komoditas hasil pendataan Survei Biaya Hidup (SBH) tahun 2010. Survei Biaya Hidup juga menghasilkan Nilai Konsumsi Dasar ( $P_0Q_0$ ), yaitu nilai yang dikeluarkan oleh rumah tangga untuk memperoleh suatu komoditi yang dikonsumsi pada tahun dasar (tahun dilakukannya SBH).

Dalam harga yang dikumpulkan dan Nilai konsumsi hasil SBH diolah dalam bentuk indeks yang dikenal dengan sebutan Indeks Harga Konsumen (IHK). Tidak seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur melaksanakan SBH. Kabupaten Sidoarjo untuk penghitungan nilai konsumsi menggunakan nilai konsumsi Kota Surabaya sebagai kota terdekat yang melaksanakan SBH.

Formula indeks yang digunakan untuk menghitung IHK masing-masing kota adalah berdasarkan *Formula Laspeyres* dengan modifikasi sebagai berikut:

$$IHK_n = \frac{\sum_{i=1}^k \frac{P_{ni}}{P_{(n-1)i}}}{\sum_{i=1}^k P_{0i} Q_{0i}} \times P_{(n-1)i} Q_{0i} \times 100$$

Dimana:

$IHK_n$  = Indeks Harga Konsumen bulan ke- $n$

- $P_{ni}$  = Harga jenis barang I, bulan ke-  $n$   
 $P_{(n-1)i}$  = Harga jenis barang I, bulan ke-  $(n-1)$   
 $P_{(n-1)i}Q_{0i}$  = Nilai konsumsi jenis barang I, bulan ke-  $(n-1)$   
 $P_{ni}Q_{0i}$  = Nilai konsumsi jenis barang I, pada bulan dasar  
 $K$  = banyaknya jenis barang paket komoditas dalam sub kelompok.

Sedangkan laju inflasi bulanan suatu kota dihitung dengan menggunakan rumus:

$$LI_n = \frac{I_n - I_{(n-1)}}{I_{(n-1)}} \times 100\%$$

Dimana:

- $LI_n$  = Laju Inflasi bulan ke-  $n$   
 $I_n$  = Indeks bulan ke-  $n$   
 $I_{(n-1)}$  = Indeks bulan ke-  $(n-1)$

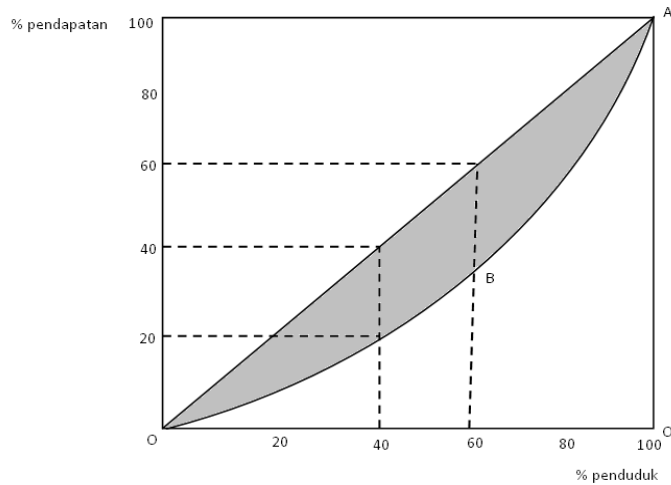
## 2.5. Indeks Gini

Indeks Gini atau Koefisien Gini adalah sebuah ukuran yang menunjukkan apakah pendistribusian dari pendapatan merata secara nyata. Koefisien Gini merupakan rasio antara garis 45 derajat dengan Kurva Lorenz dan area dalam segitiga. Koefisien ini bernilai 0 (nol), jika distribusi menyebar merata secara nyata, dan mendekati 1 (satu), jika secara nyata menyebar tidak merata. Gini rasio memiliki nilai antara 0 dan 1 (digunakan dalam bahasan ini), atau jika dalam persen maka nilainya antara 0 dan 100 persen. Berdasarkan nilai Gini rasio, terdapat 3 (tiga) kelompok ketimpangan, *tinggi* jika koefisien gini bernilai 0,50 atau lebih, *sedang* jika nilainya diantara 0,36-0,49 dan *rendah* jika kurang dari 0,36.

Untuk mendapatkan Gini rasio, data yang digunakan adalah data rata-rata pengeluaran perkapita sebulan yang lalu dari hasil Susenas. Data tersebut diurutkan berdasarkan rata-rata pengeluaran perkapita sebulan dari yang terendah sampai tertinggi. Selanjutnya data tersebut dikelompokkan menjadi lima kelompok penduduk yang jumlahnya sama besar, berdasarkan urutan tersebut. Kemudian dihitung persentase total pengeluaran untuk tiap kelompok. Dengan metode ini, selain dapat diperoleh Koefisien Gini, juga dapat diperoleh indikator distribusi pendapatan

(pengeluaran) menurut Bank Dunia. Bentuk umum dari Kurva Lorenz yang menggambarkan antara kumulatif penduduk dengan kumulatif pengeluaran adalah seperti gambar berikut:

Gambar 2.1  
Kurva Lorenz



Data yang diperoleh kemudian dilakukan scatter plot, dengan terlebih dahulu mengkumulatifkan total pengeluaran perkapita, sehingga akan diperoleh hasil plot seperti gambar 2.1. Formula untuk menghitung Koefisien Gini adalah sebagai berikut:

$$Gini Ratio = \frac{\text{Luas daerah yang terletak di antara } OA \text{ dan } OAB}{\text{Seluruh daerah } OAO'}$$

Atau,

$$Gini Ratio = \sum_{k=1}^{n-1} C_{k+1}P_k - \sum_{k=1}^{n-1} C_kP_{k+1}$$

Dimana,

- $C$  = Persentase kumulatif konsumsi,
- $P$  = Persentase kumulatif penduduk,
- $k$  = Kelompok kelas ke- (1,2,3,...,n).

## 2.6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Kebijakan politik desentralisasi yang ditandai dengan berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, memberikan hak otonomi bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Penyelenggaraan pemerintahan di daerah diserahkan kepada pemerintah daerah kecuali urusan politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, pendidikan, moneter dan fiskal.

Pemerintahan daerah juga diberi kewenangan untuk mengelola keuangan daerahnya melalui UU No. 33 Tahun 2004 serta disusul dengan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang setiap tahunnya ditetapkan dengan peraturan daerah. Proses penetapan APBD dilakukan oleh kepala daerah dengan persetujuan dari DPRD dan diberlakukan untuk masa 1 (satu) tahun anggaran mulai 1 Januari sampai 31 Desember.

APBD yang direncanakan setiap tahun pada dasarnya menunjukkan dari mana sumber-sumber Pendapatan Daerah, berapa besar alokasi belanja untuk melaksanakan program/kegiatan dan pembiayaan yang muncul bila terjadi surplus atau defisit. Struktur APBD berdasarkan Permendagri No 13 Tahun 2006 Tentang Keuangan Daerah, terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.

APBD tidak hanya sekedar rencana keuangan daerah, tetapi juga merupakan dokumen perencanaan pembangunan pemerintah daerah yang mencerminkan bagaimana arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah yang harus dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat serta didistribusikan secara patut dan adil. Pelaksanaan pelayanan publik di daerah sangat berkaitan erat dengan kebijakan Belanja Daerah. Belanja Daerah merupakan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendanai seluruh program/kegiatan yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan publik di daerah.

Aktivitas pembangunan dan pemerintahan di daerah dapat dilihat dari kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Struktur APBD akan mampu memperlihatkan keseriusan

suatu pemerintah daerah dalam mengelolakeuangan daerah mulai dari besaran potensi penerimaan yang akan digali, ke arah mana belanja daerah itu difokuskan atau dari mana defisit anggaran akan dibiayai. Dari struktur dan porsibelanja daerah dapat diketahui kecenderungan belanja daerah, apakah cenderung padapenyelenggaraan pemerintahan dan aparatur pemerintahan atau cenderung pada penyelenggaraanpembangunan daerah<sup>1</sup>.

Salah satu indikator yang sering digunakan untuk menganalisis keefektifan dari program pembangunan pemerintah termasuk pemerintah daerah adalah melalui besaran rasio belanja pegawai terhadap total APBD. Rasio ini memperlihatkan rasio belanja pegawai terhadap belanja daerah. Semakintinggi angka rasionya maka semakin besar proporsi APBD yang dialokasikan untuk belanja pegawai dan begitu sebaliknya semakin kecil angka rasio belanja pegawai maka semakin kecilpula proporsi APBD yang dialokasikan untuk belanja pegawai.

Belanja pegawai yang dihitung dalam rasio ini meliputi belanja pegawai langsung dan belanja pegawai tidak langsung. Belanja daerah yang masih didominasi oleh belanja pegawai secara implisit memberikan indikasi bahwa pemerintah daerah tersebut hanya menganggarkan sebagian kecil APBD-nya untuk jenis-jenis belanja selain belanja pegawainya. Hal ini akan menyebabkan keterbatasan program dan kegiatan daerah di luar belanja pegawai yang bisa didanai, khususnya yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

## **2.7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

UNDP merekomendasikan tingkat keberhasilan pembangunan suatu negara secara minimal dapat direfleksikan dengan tingkat pemenuhan tiga dimensi dasar, yaitu:

- 1) Umur Panjang dan Hidup Sehat (*a long and helaty life*)

---

<sup>1</sup>Mochamad Fajar Hidayat, Ghozali Maski, "Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur), Jurnal Ilmiah, Tahun 2013.

Dimensi ini dicerminkan oleh Angka Harapan Hidup (*life expectancy at age 0: eo*)

2) Pengetahuan (*knowledge*)

Dimensi ini dicerminkan oleh dua kriteria, yaitu :

- a. Harapan Lama Sekolah (HLS)
- b. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

3) Standar Hidup Layak (*decent dtandard of living*)

Dimensi ini dicerminkan oleh PDB per kapita. BPS merefleksikan dimensi ini melalui pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Formula untuk menghitung angka IPM adalah sebagai berikut:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pengetahuan} \times I_{pendapatan}}$$

Dimana,

$$I_{kesehatan} = \frac{e_0 - e_{0\ min}}{e_{0\ maks} - e_{0\ min}}$$

- $I_{kesehatan}$  = Indeks Kesahatan
- $e_0$  = Angka harapan hidup
- $e_{0\ min}$  = Angka harapan hidup minimal
- $e_{0\ maks}$  = Angka harapan hidup maksimal

$$I_{pengetahuan} = \frac{I_{EYS} + I_{MYS}}{2}$$

- $I_{pengetahuan}$  = Indeks Pengetahuan/ Pendidikan
- $I_{EYS}$  = Indeks Angka Harapan Sekolah
- $I_{MYS}$  = Indeks Rata-rata Lama Sekolah

$$PPP_j = \frac{\sum_{i=1}^m \frac{p_{ik}^{1/m}}{p_{ik}}}{m}$$

- $p_{ik}$  = harga komoditas  $i$  di Jakarta Selatan
- $p_{ik}$  = harga komoditas  $i$  di kab/kota  $j$
- $m$  = jumlah komoditas



UNDP yang telah mengelompokkan IPM kedalam empat kriteria yaitu:

1. Rendah :  $IPM < 50$
2. Menengah Bawah :  $50 \leq IPM < 66$
3. Menengah Atas :  $66 \leq IPM < 80$
4. Tinggi :  $IPM \geq 80$

### BAB III INDIKATOR PARADIGMA PEMBANGUNAN EKONOMI

#### 3.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 - 2016

Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku ADHB) Kabupaten Sidoarjo terus meningkat dari tahun ke tahun, sejalan dengan membaiknya kondisi perekonomian di Kabupaten Sidoarjo. PDRB Kabupaten Sidoarjo Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir masing-masing sebesar 105,85 trilyun rupiah (2012); 117,74 trilyun rupiah (2013); 131,64 trilyun rupiah (2014); 146,08 trilyun rupiah (2015) dan 160,020 trilyun rupiah (2016).

**Tabel 3.1.1.**  
**Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**  
**Atas Dasar Harga Berlaku 2014 – 2016 (juta rupiah)**

Kategori	Uraian	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,140,355	3,559,687	3,817,608
B	Pertambangan dan Penggalian	208,063	139,475	141,810
C	Industri Pengolahan	61,953,539	68,562,265	73,636,756
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,655,326	1,703,576	1,727,112
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	88,478	96,413	104,511
F	Konstruksi	12,117,758	13,228,282	14,597,003
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	20,810,686	23,055,490	25,623,447
H	Transportasi dan Pergudangan	15,075,773	17,095,795	19,623,165
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,153,252	4,763,894	5,453,141
J	Informasi dan Komunikasi	4,573,050	5,036,600	5,588,595
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,624,148	1,846,582	2,053,166
L	Real Estate	1,159,634	1,335,786	1,471,789
M,N	Jasa Perusahaan	206,260	229,403	253,009
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,433,970	2,666,420	2,942,523
P	Jasa Pendidikan	1,557,646	1,766,932	1,913,688
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	405,537	455,188	492,318
R,S,T,U	Jasa lainnya	482,354	539,100	581,013
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>131,645,828</b>	<b>146,080,890</b>	<b>160,020,653</b>

Sedangkan nilai PDRB Kabupaten Sidoarjo Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir masing-masing sebesar 93,54 trilyun rupiah (2012); 99,99 trilyun rupiah (2013); 106,43 trilyun rupiah (2014); 112,01 trilyun rupiah (2015) dan 118,18 trilyun rupiah (2016).

**Tabel 3.1.2.**  
**Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**  
**Atas Dasar Harga Konstan 2014 – 2016 (juta rupiah)**

Kategori	Uraian	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,396,800	2,509,247	2,604,216
B	Pertambangan dan Penggalian	151,770	139,257	146,552
C	Industri Pengolahan	52,756,515	55,755,893	58,304,852
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,183,333	1,144,906	1,123,397
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	83,870	87,382	90,929
F	Konstruksi	9,786,088	10,144,359	10,747,948
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17,142,349	17,938,334	19,059,370
H	Transportasi dan Pergudangan	8,691,656	9,150,104	9,833,803
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,418,656	3,694,811	4,023,275
J	Informasi dan Komunikasi	4,438,617	4,744,061	5,132,599
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,259,477	1,347,524	1,446,720
L	Real Estate	1,021,248	1,079,860	1,154,478
M,N	Jasa Perusahaan	169,088	177,623	187,339
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,932,660	1,973,449	2,070,543
P	Jasa Pendidikan	1,235,496	1,324,621	1,405,821
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	348,509	366,262	387,725
R,S,T,U	Jasa lainnya	418,152	435,166	459,623
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>106,434,284.6</b>	<b>112,012,859.7</b>	<b>118,179,189.9</b>

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Sidoarjo

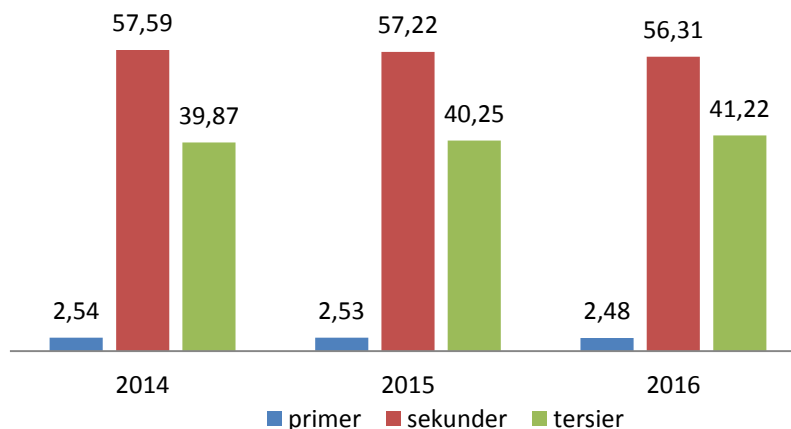
Posisi geografis Kabupaten Sidoarjo yang berbatasan dengan Surabaya sebagai ibukota provinsi Jawa Timur memberikan pengaruh positif pada perkembangan kegiatan ekonomi di daerah ini. Mobilitas penduduk dan juga sentra-sentra ekonomi yang sudah relatif terlalu padat di Surabaya menuju daerah sekitar Surabaya termasuk Kabupaten Sidoarjo semakin mempercepat perkembangan perekonomian yang ada. Perkembangan

sektor properti, pengembangan lokasi industri serta sentra perdagangan di daerah ini tentunya tidak terlepas dari semakin besarnya potensi pasar yang ada di Sidoarjo.

Aktivitas pembangunan khususnya bidang ekonomi di Kabupaten Sidoarjo telah mengalami pergeseran struktur dari sektor primer ke arah sektor sekunder dan tersier. Pada sektor primer, kontribusinya dalam mendukung perekonomian Sidoarjo selama lima tahun terakhir terus mengalami penurunan. Kontribusi sektor ini terhadap pembentukan PDRB stabil berada pada kisaran 2-3 persen. Penurunan peranan sektoral ini disebabkan oleh karena kedua lapangan usaha yang tergabung dalam kelompok ini, secara bersamaan mengalami penurunan kontribusinya terhadap Total PDRB (Pertanian dan Pertambangan/ Penggalian).

Kontribusi sektor sekunder mulai menurun, dari sekitar 60 persen di Tahun 2011 menjadi 56 persen di Tahun 2016. Lapangan usaha industri sebagai penentu sektor sekunder bertahap menurun kontribusinya terhadap PDRB. Sedangkan kontribusi sektor tersier mulai beranjak naik. Kontribusi sektor ini mulai berada di kisaran 40 persen di Tahun 2016. Perkembangan yang pesat dari lapangan usaha transportasi dan pergudangan sangat membantu kemajuan sektor ini. Lapangan usaha transportasi di Sidoarjo didominasi oleh angkutan udara.

**Grafik 3.1.1.**  
**Perbandingan Sektoral PDRB Kabupaten Sidoarjo**  
**Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan**  
**Tahun 2014 – 2016**



### 3.2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 - 2016

PDRB Kabupaten Sidoarjo Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir terus meningkat. Peningkatan nilai PDRB ini sejalan dengan membaiknya kondisi perekonomian di Kabupaten Sidoarjo. Peningkatan PDRB tersebut tentunya belum bisa menggambarkan pertumbuhan perekonomian secara riil, mengingat nilai PDRB atas dasar harga berlaku tersebut masih mengandung pengaruh perubahan harga.

**Tabel 3.2.1.**  
**Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha**  
**Kabupaten Sidoarjo**  
**Tahun 2013 – 2016 (persen)**

Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.50	4.63	4.69	3.78
B	Pertambangan dan Penggalian	-13.98	15.05	-8.24	5.24
C	Industri Pengolahan	6.27	7.28	5.69	4.57
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9.51	7.32	-3.25	-1.88
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.26	1.91	4.19	4.06
F	Konstruksi	6.76	6.67	3.66	5.95
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9.30	6.53	4.64	6.25
H	Transportasi dan Pergudangan	5.71	0.57	5.27	7.47
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.23	9.02	8.08	8.89
J	Informasi dan Komunikasi	9.65	8.74	6.88	8.19
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	12.44	6.63	6.99	7.36
L	Real Estate	6.16	6.78	5.74	6.91
M,N	Jasa Perusahaan	4.98	6.68	5.05	5.47
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.81	1.28	2.11	4.92
P	Jasa Pendidikan	9.03	6.48	7.21	6.13
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.60	9.17	5.09	5.86
R,S,T,U	Jasa lainnya	4.81	4.27	4.07	5.62
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>6,89</b>	<b>6,44</b>	<b>5,24</b>	<b>5,51</b>

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Sidoarjo

Untuk melihat pertumbuhan riil di Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat dari PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 (tahun dasar 2010), dimana pertumbuhan

ekonomi ini sudah bebas dari pengaruh perubahan harga (pertumbuhan yang benar benar diakibatkan dari adanya perubahan jumlah nilai produk barang dan jasa).

Percepatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo tahun 2016 sebesar 5,51 persen, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 5,24 persen. Iklim ekonomi mulai membaik di Sidoarjo didukung stabilitas perekonomian nasional yang baik dan inflasi yang rendah di Jawa Timur dan nasional.

Sektor *primer* yang dicerminkan dari pertumbuhan lapangan usaha pertanian pada tahun 2012 pertumbuhannya masih 9,20 persen. Di tahun-tahun berikutnya pertumbuhan ekonominya terus menurun hingga tinggal 3,78 persen pada tahun 2016.

Di sektor *sekunder*, besar peran lapangan usaha industri sebagai lokomotif penggerak pembangunan di Sidoarjo. Di lapangan usaha industri, pembentukan nilai tambah pada kategori ini masih didominasi oleh perusahaan-perusahaan industri berskala besar dan sedang yang mempekerjakan tenaga kerja minimal 20 orang. Sedangkan menjamurnya industri mikro dan kecil (UMKM), kerajinan dan rumahtangga yang mampu memberdayakan tenaga kerja dari daerah setempat, mencapai kurang dari 10 persen. Pertumbuhan riil lapangan usaha industri pengolahan pada Tahun 2016 sebesar 4,57 persen; melambat dari Tahun 2015 yang mampu tumbuh sebesar 5,69 persen.

Pertumbuhan pada sektor konstruksi yang berkaitan dengan kegiatan properti dan juga pembangunan infrastruktur lainnya selama tiga tahun terakhir terlihat relatif tinggi. Hal tersebut tidak lepas dari masih tingginya potensi pasar properti akibat dari tingginya mobilitas maupun pertumbuhan jumlah penduduk yang masih cukup tinggi. Kondisi tersebut juga tergambarkan dari sektor akomodasi dan makan, minum yang terdiri dari hotel, penginapan dan juga restoran serta warung makan maupun kedai juga mencatatkan pertumbuhan yang sangat tinggi selama tiga tahun terakhir.

Sektor perdagangan juga tercatat memiliki pertumbuhan yang tinggi, sebesar 6,25 persen pada tahun 2016. Berdirinya beberapa sentra perdagangan dan juga semakin banyaknya lokasi perumahan baru menjadi penggerak munculnya usaha

perdagangan baru untuk memenuhi permintaan pasar yang masih cukup tinggi. Lapangan usaha perdagangan dan restoran diperkirakan akan tumbuh pesat selama kurun waktu 5 tahun mendatang. Dari data Sensus Ekonomi 2016 tercatat bahwa jumlah kegiatan usaha di lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor lebih dari ini lebih dari 76 ribu unit usaha. Sedangkan unit usaha lapangan usaha akomodasi makan dan minum mencapai 36 ribu usaha. Dibanding jumlah penduduk saat ini (2,117 juta jiwa), dan pertumbuhan penduduk 1,5 persen per tahun, diharapkan kedua sub sektor ini akan mampu menjadi motor penggerak perekonomian di Sidoarjo pada masa mendatang. Disamping memiliki pasar yang potensial bagi produk barang dan jasa di tingkat lokal, ekspor Sidoarjo ke luar negeri selama 5 tahun terakhir juga selalu terjaga di atas US\$ 1 milyar.

Secara parsial, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha di sektor tersier. Yaitu lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 8,89 persen. Disusul lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 8,19 persen dan lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 7,47 persen.

Laju pertumbuhan lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi mencapai 7,36 persen. Kategori ini mampu menjaga stabilitasnya hingga bisa tumbuh pada kisaran 6-7 persen 3 tahun terakhir.

Percepatan pertumbuhan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor tumbuh 6,25 persen, naik dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh 4,64 persen. Begitu pula lapangan usaha yang digeluti oleh pemerintah mampu tumbuh pada kisaran 4-6 persen. Yaitu lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial serta lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang. Adapun lapangan usaha jasa lainnya mengalami pertumbuhan di kisaran 5 – 7 persen.

Jika kondisi perekonomian berjalan normal, sektor tersier yang memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi 7-9 persen per tahun, dalam waktu sekitar 5 tahun akan mampu melampaui peranan sektor sekunder yang memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi 4-5 persen per tahun.



### 3.3. Struktur Perekonomian

Tingkat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan yang dihitung dari PDRB merupakan rata-rata tertimbang dari tingkat pertumbuhan sektoralnya. Apabila sebuah sektor memiliki kontribusi besar dan pertumbuhannya lambat maka hal ini akan menghambat tingkat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Sebaliknya, apabila sektor yang mempunyai kontribusi besar terhadap totalitas perekonomian tersebut mampu mencapai pertumbuhan tinggi, maka sektor tersebut secara otomatis akan menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi secara total.

Peran kelompok sektor *primer* (pertanian, pertambangan dan penggalian) di Kabupaten Sidoarjo relatif kecil dibanding dengan sektor *sekunder* dan sektor *tersier*. Adanya konversi dari lahan produktif menjadi perumahan maupun lokasi industri baru akan lebih mendorong semakin rendahnya kontribusi kelompok ini terhadap total PDRB Kabupaten Sidoarjo. Ke depan struktur perekonomian Kabupaten Sidoarjo akan semakin bergeser pada kelompok sektor *sekunder* maupun *tersier*.

Peran kelompok sektor *primer* dalam mendukung perekonomian Sidoarjo selama lima tahun terakhir terus mengalami penurunan. Kontribusi sektor *primer* berkisar 2-3 persen per tahunnya.

Peran kelompok sektor *sekunder* sangat tinggi (56 persen) terhadap total PDRB Kabupaten Sidoarjo. Peran terbesar ataupun penyumbang nilai tambah terbesar berada pada sub sektor Industri Pengolahan. Pada tahun 2016, sektor industri pengolahan mampu berkontribusi sebesar 46,02 persen terhadap Total PDRB, sehingga naik-turunnya kegiatan ekonomi di sektor ini akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo. Kontribusi sektor sekunder mulai menurun, dari sekitar 60 persen di Tahun 2011 menjadi 56 persen di Tahun 2016. Lapangan usaha industri sebagai penentu sektor sekunder bertahap menurun kontribusinya terhadap PDRB.

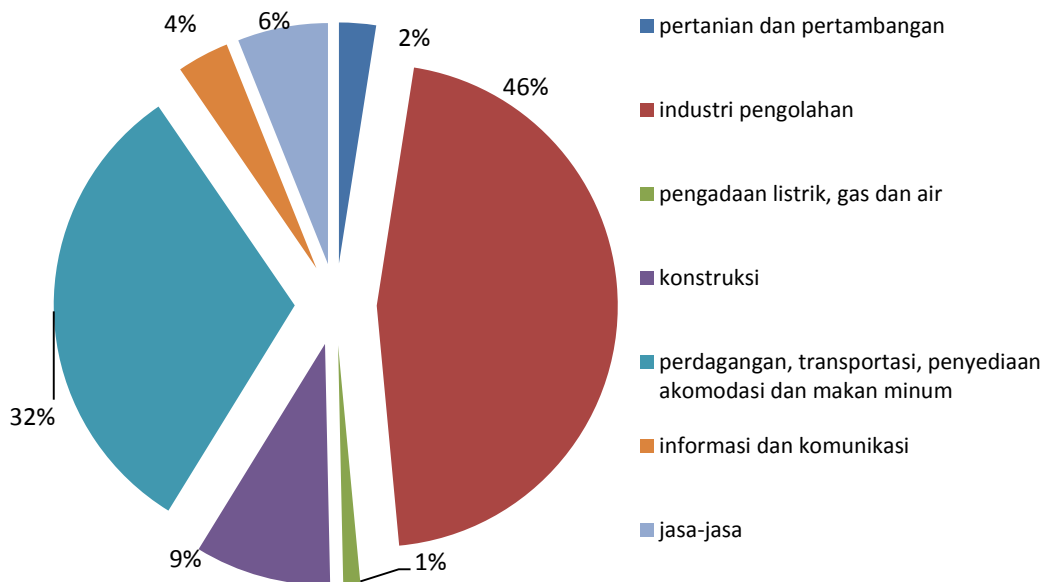
Perlambatan pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan berjalan seiring dengan konsumsi swasta yang menurun, juga dipengaruhi kebijakan pajak yang baru dari pemerintah. Kebijakan perpajakan yang baru dengan nilai yang lebih besar

membuat pengusaha “berfikir ulang” untuk menata strategi baru. Strategi agar perusahaan tidak merugi, minimal bisa mempertahankan keuntungan yang sama dengan tahun sebelumnya. Begitu pula bagi perusahaan-perusahaan yang bahan bakunya berasal dari impor. Mereka harus membayar cukai yang lebih mahal dari tahun sebelumnya.

Mata rantai menurunnya kegiatan di lapangan usaha industri ini secara langsung akan berimbas pada kegiatan ekonomi di sektor lain yang terkait. Pada tahun 2014, lapangan usaha industri pengolahan mampu tumbuh menembus angka 7 persen per tahun, dengan kontribusi yang dominan sekitar 47 persen terhadap Total PDRB.

Pada tahun 2016 pertumbuhan lapangan usaha industri melambat sebesar 4,57 persen dengan kontribusi sebesar 46,02 persen terhadap total PDRB. Naik-turunnya kegiatan ekonomi di lapangan usaha ini akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo.

**Grafik 3.3.1.**  
**Persentase PDRB Kabupaten Sidoarjo Menurut Lapangan Usaha**  
**Atas Dasar Harga Berlaku**  
**Tahun 2016 (Persen)**



Bagaimanapun juga lapangan usaha industri tetap menjadi penyumbang *value added* yang terbesar, karena Kabupaten Sidoarjo merupakan kota industri kedua setelah Kota Surabaya yang juga merupakan ring pertama dalam sistim pengupahan termasuk Sidoarjo, Surabaya dan Gresik.

Kontribusi sektor *tersier* mulai beranjak naik terhadap total PDRB Kabupaten Sidoarjo. Kontribusi sektor ini mulai mendekati kisaran 40 persen di tahun 2016. Perkembangan yang pesat dari lapangan usaha transportasi dan pergudangan sangat membantu kemajuan sektor ini. Lapangan usaha transportasi di Sidoarjo didominasi oleh angkutan udara. Keberadaan Bandara Juanda sebagai bandara internasional yang semakin padat aktivitasnya turut mendongkrak peran di sektor ini.

Dari grafik 3.3.1. dapat dilihat bahwa ada tiga sektor ekonomi yang selalu dominan kontribusinya di Kabupaten Sidoarjo yaitu: industri pengolahan; perdagangan, hotel dan restoran serta pengangkutan dan komunikasi. Ketiga sektor tersebut telah menjadi tulang punggung bagi perekonomian di Sidoarjo karena kontribusinya yang sangat tinggi (74,14 persen).

#### **3.4. PDRB Perkapita**

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di suatu daerah tidak bisa secara langsung diartikan meningkat pula kesejahteraan masyarakat daerah tersebut. Dampak pertumbuhan ekonomi tersebut harus bisa dipastikan dinikmati oleh seluruh masyarakat daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan relatif kurang berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat jika pertumbuhan jumlah penduduk juga tinggi. Salah satu indikator yang dianggap bisa lebih menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat daerah tersebut adalah PDRB perkapita/Pendapatan perkapita.

Dengan definisi PDRB perkapita adalah total PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, dianggap bahwa tiap penduduk juga ikut merasakan peningkatan atau hasil pertumbuhan jika terjadi peningkatan PDRB perkapita di suatu daerah.

Biasanya semakin tinggi nilai PDRB per kapita dan Pendapatan Regional per kapita, semakin baik pula kondisi perekonomian di wilayah tersebut, meskipun sebenarnya ukuran tersebut belum bisa memperlihatkan kesenjangan pendapatan antar penduduk. Hal ini disebabkan dari seluruh kegiatan ekonomi yang dihasilkan di suatu wilayah, belum tentu seluruhnya dinikmati oleh penduduk di wilayah yang bersangkutan.

Dari data 5 tahun terakhir, terlihat bahwa peningkatan besaran PDRB masih selalu diikuti dengan kenaikan PDRB per kapita nya. Pada periode 3 tahun terakhir, PDRB Sidoarjo adalah 131,64 triliun rupiah (2014); 146,08 triliun rupiah (2015) dan 160,02 triliun rupiah (2016). Sedangkan PDRB perkapita nya mencapai 63,17 juta rupiah (2014); 68,99 juta rupiah (2015) dan 74,41 juta rupiah (2016). Kenaikan besaran PDRB dan PDRB per kapita tiap tahun ini ternyata seiring dengan kenaikan Pendapatan Regional Perkapita (Tabel 3.4.1).

**Tabel 3.4.1.**  
**Perbandingan PDRB dan PDRB Perkapita (ADHB)**  
**Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013-2016**

Uraian	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (trilyun rupiah)	117,74	131,64	146,06	160,02
PDRB Perkapita (trilyun rupiah)	57,46	63,17	68,99	74,41
Penduduk Pertengahan Tahun (juta jiwa)	2,05	2,08	2,12	2,15

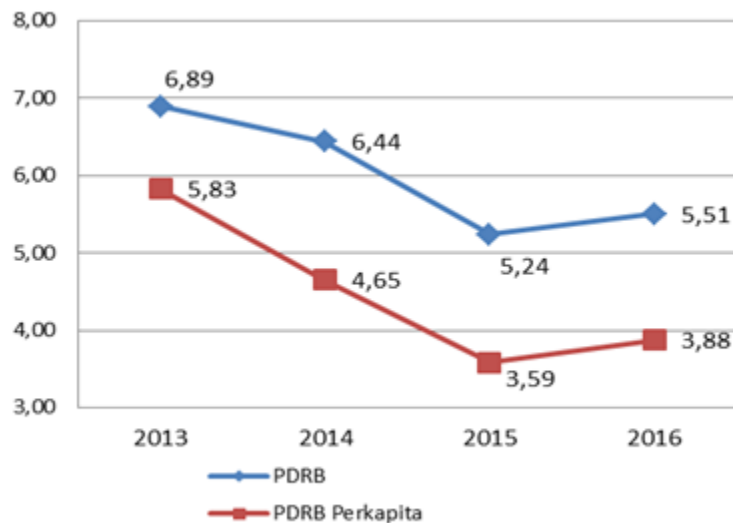
Sumber Data : Badan Pusat Statistik Sidoarjo

Dari sisi PDRB atas harga konstan, bisa dilihat bahwa ternyata meskipun besaran PDRB meningkat beriringan dengan PDRB perkapita namun tingkat kenaikannya tidaklah sama. Jika selama 2013-2016, total PDRB mampu mencapai pertumbuhan antara 6,89 – 5,24 persen; maka pada periode yang sama, PDRB perkapita hanya mampu tumbuh antara 3,59 – 5,83 persen.

Pertumbuhan PDRB per kapita tersebut bisa lebih tinggi seandainya pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sidoarjo bisa ditekan lebih rendah lagi. Namun

faktanya pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sidoarjo selama 5 tahun terakhir masih mencapai 1,59 persen/tahun (tertinggi di Jawa Timur). Pertumbuhan penduduk sebesar itu lebih disebabkan oleh arus migrasi masuk, dari pada akibat pertumbuhan alamiah (lahir-mati).

**Grafik 3.4.1.**  
**Perbandingan Pertumbuhan PDRB dan PDRB Perkapita (ADHK)**  
**Kabupaten Sidoarjo**  
**Tahun 2013-2016**



### 3.5. Laju Inflasi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 - 2016

Penghitungan laju inflasi Kabupaten Sidoarjo didasarkan pada hasil pemantauan/pendataan harga barang dan jasa yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada pasar tradisional dan pasar modern di wilayah Sidoarjo.

Laju inflasi Kabupaten Sidoarjo pada akhir tahun 2016 sebesar 3,03 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 3,15 persen (yoy). Laju inflasi Jawa Timur lebih rendah dibandingkan Kabupaten Sidoarjo; dimana pada akhir tahun 2016 sebesar 2,74 persen (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3,08 persen (yoy).

Laju inflasi Kabupaten Sidoarjo yang rendah pada akhir tahun 2016 didorong oleh deflasi kelompok *volatile food* dan *administrated prices* serta rendahnya inflasi kelompok *core inflation*.

Kelompok *volatile food* mengalami deflasi dari -0,93 persen (yoy) menjadi -1,85 persen (yoy). Bahan makanan tersebut meliputi padi-padian, daging, telur, susu, bumbu-bumbuan dan minyak. Hal ini dipicu melimpahkan pasokan bahan makanan ke Kabupaten Sidoarjo. Kelompok *administrated prices* mengalami deflasi dari 0,63 persen (yoy) menjadi -4,42 persen (yoy). Pada kelompok ini dipengaruhi masih terjangkaunya kenaikan tarif angkutan periode Natal dan Tahun Baru diiringi kenaikan harga BBM non subsidi.

Pada kelompok *core inflation* terlihat menurun laju inflasi pada kelompok perumahan (dari 14,99 persen (yoy) menjadi 6,46 persen (yoy)), sandang (dari 5,56 persen (yoy) menjadi 0,87 persen (yoy)) dan kesehatan (dari 8,93 persen (yoy) menjadi 6,32 persen (yoy)). Semakin membaiknya iklim perekonomian Kabupaten Sidoarjo mendukung pertumbuhan dan perkembangan konstruksi pemukiman. Kucuran dana investasi yang besar, memicu merebaknya usaha fashion dan kegiatan bidang kesehatan membuat harga produk fashion dan kesehatan bersaing.

Sedangkan laju inflasi di kelompok pendidikan dan rekreasi meningkat dari 2,58 persen (yoy) menjadi 13,13 persen (yoy). Semakin tingginya biaya pendidikan dan besarnya kebutuhan untuk rekreasi membuat laju inflasi kelompok ini meningkat.

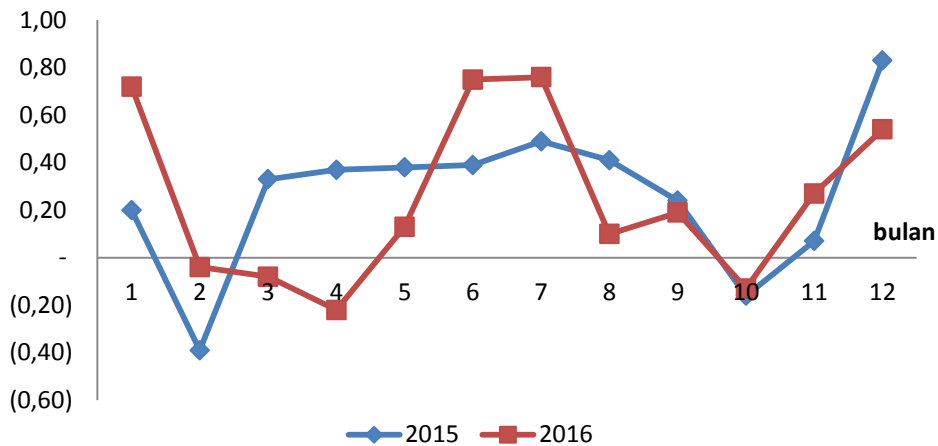
**Gambar 3.5.1.**  
**Laju Inflasi Year on Year (yoy) Kabupaten Sidoarjo**  
**Tahun 2015 – 2016**

Kelompok dan Sub Kelompok Jenis Barang/ Jasa		Des'14 - Des'15	Des'15 - Des'16
(1)	(2)	(3)	
100	BAHAN MAKANAN	(0,93)	(1,85)
200	MAK. JADI, MIN, ROKOK, TEMBA.	6,36	5,95
300	PERUMAHAN	14,99	6,46
400	SANDANG	5,56	0,87
500	KESEHATAN	8,93	6,32
600	PENDIDIKAN, REKREASI DAN OLAHRAGA	2,58	13,13
700	TRANS. DAN KOMUNIKASI	0,63	(4,42)
000	UMUM	3,15	3,03

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Sidoarjo

Secara bulanan, inflasi tertinggi Kabupaten Sidoarjo terjadi di bulan Juni-Juli 2016. Tekanan inflasi bulan Juli ini dipengaruhi *moment* Lebaran, tingginya permintaan berjalan seiring dengan naiknya harga barang dan jasa. Pemicu lain adanya kenaikan harga bensin dan tarif jasa angkutan, tarif listrik kelompok rumah tangga non subsidi.

**Grafik 3.5.1.**  
**Inflasi Bulanan Kabupaten Sidoarjo**  
**Tahun 2015 – 2016**



### 3.6. Indeks Gini

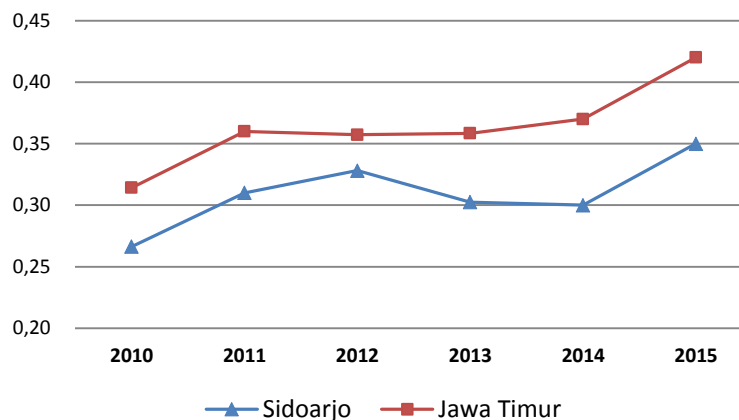
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak secara langsung memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya secara keseluruhan. Hasil pembangunan harus mampu secara “merata” dinikmati oleh seluruh penduduk di daerah tersebut. Diperlukan kebijakan untuk penyiapan sumber daya manusia yang memadai dan memiliki kompetensi agar mampu berkompetisi pada pasar kerja yang tersedia diharapkan akan mengurangi kesenjangan terhadap distribusi hasil pembangunan yang ada. Salah satu indikator yang dianggap bisa memberikan gambaran mengenai tingkat pemerataan distribusi pendapatan yang ada di suatu daerah adalah indeks Gini (Gini Rasio).

Gini rasio memiliki nilai antara 0 dan 1 (digunakan dalam bahasan ini), atau jika dalam persen maka nilainya antara 0 dan 100 persen. Berdasarkan nilai Gini rasio,

terdapat 3 (tiga) kelompok ketimpangan, *tinggi* jika koefisien gini bernilai 0,50 atau lebih, *sedang* jika nilainya diantara 0,36-0,49 dan *rendah* jika kurang dari 0,36.

Gini rasio Kabupaten Sidoarjo selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir berada pada kisaran 0.30, dalam arti bahwa Kabupaten Sidoarjo masuk dalam kategori ketimpangan distribusi pendapatan *rendah*. Gini rasio selama kurun waktu tahun 2010 – 2015 adalah masing-masing 0,27 persen, 0.31 persen, 0.33 persen, 0,30 persen, 0,30 persen dan 0,35 persen. (gambar 3.6.1.).

**Grafik 3.6.1.**  
**Perbandingan Gini Rasio**  
**Kabupaten Sidoarjo dan Provinsi Jawa Timur**  
**Tahun 2010 – 2015**



### 3.7. Realisasi Anggaran dan Belanja Pemerintah Daerah

Struktur anggaran daerah mencerminkan strategi dan fokus kegiatan pemerintah dalam pembangunan daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk kreatif dan inovatif terkait dengan alokasi penganggaran dikarenakan adanya keterbatasan potensi dan sumber daya yang ada. Dengan sumber daya yang terbatas, pemerintah daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum.



Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2016 mencapai 3,6 triliun rupiah, bertambah sekitar 100 milyar rupiah dari tahun sebelumnya. Secara agregat, sumber pendapatan utama pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah dana perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah mampu penyumbang 36 persen terhadap pendapatan daerah Kabupaten Sidoarjo. Dalam lingkup Jawa Timur, capaian realisasi PAD Kabupaten Sidoarjo tahun 2016 merupakan tertinggi diantara 38 kabupaten/kota, sebesar 108,54 persen. Sumber utama PAD Kabupaten Sidoarjo adalah penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) perdesaan dan perkotaan. Selain itu Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu wilayah yang menerapkan sistem parkir berlangganan, sehingga mampu mendongkrak PAD.

**Gambar 3.7.1.**  
**Realisasi Pendapatan dan Pengeluaran Daerah Kabupaten Sidoarjo**  
**Tahun 2014 – 2016**

URAIAN	Jumlah (ribu rupiah)		
	2014	2015	2016
<b>A. PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>3.273.379.956</b>	<b>3.556.219.039</b>	<b>3.668.041.958</b>
1. Pendapatan Asli Daerah	1.115.332.939	1.266.786.627	1.335.283.959
2. Dana Perimbangan	1.403.069.829	1.388.639.002	1.690.087.946
2. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	754.977.188	900.793.409	642.670.053
<b>B. BELANJA DAERAH</b>	<b>3.006.567.451</b>	<b>3.662.799.266</b>	<b>3.651.619.252</b>
1. Belanja Tak Langsung	1.576.227.733	1.841.179.061	1.935.801.235
2. Belanja langsung	1.430.339.728	1.821.620.205	1.715.818.017
<b>C. PEMBIAYAAN</b>	<b>447.780.358</b>	<b>767.215.662</b>	<b>567.569.497</b>
1. Penerimaan Pembiayaan	492.543.358	742.018.662	582.812.497
2. Pengeluaran Pembiayaan	44.763.000	43.197.000	15.243.000

Sumber data : Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo

Peningkatan realisasi PAD ini tentunya didukung oleh kinerja pemerintah daerah yang semakin baik. Peningkatan PAD harus diimbangi pula dengan kemampuan pengelolaan anggaran serta penentuan prioritas-prioritas pembangunan daerah

sehingga tujuan pembangunan dapat lebih cepat dicapai. Berbagai program pemerintah sedang digalakkan untuk memacu peningkatan PAD.

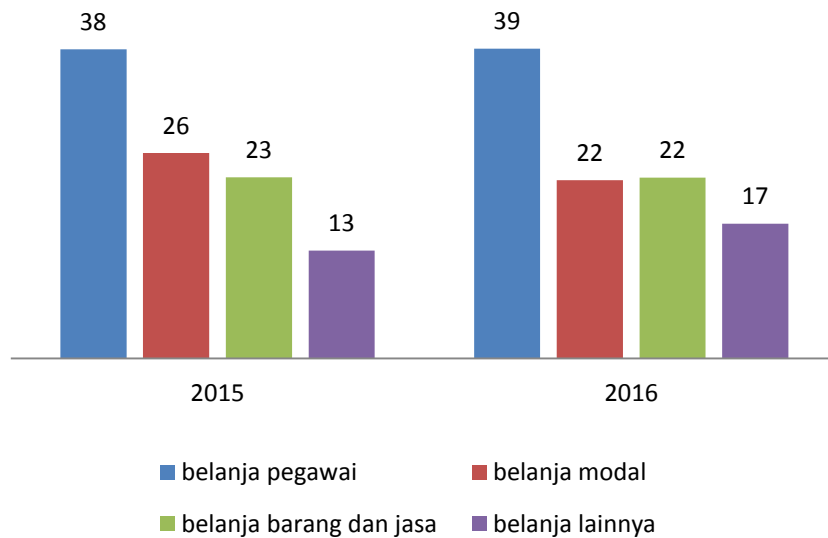
Realisasi anggaran dana perimbangan Kabupaten Sidoarjo yang merupakan transfer dari pemerintah pusat tahun 2016 mencapai 1,6 trilyun rupiah. Proporsi dana perimbangan terhadap pendapatan daerah tahun 2016 sebesar 42 persen, meningkat 7 persen dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa andil pemerintah pusat masih sangat besar dalam mendukung pembiayaan pemerintah daerah.

Pada sisi yang lain, terlihat adanya efisiensi pengelolaan anggaran belanja pemerintah daerah pada beberapa pos anggaran belanja untuk dialokasikan pembangunan infrastruktur desa/kelurahan. Realisasi anggaran belanja daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2016 mencapai 3,65 trilyun rupiah; menurun 0,35 persen dari tahun sebelumnya. Menurunnya realisasi belanja daerah Kabupaten Sidoarjo dipengaruhi oleh berkurangnya belanja pegawai, belanja modal, belanja barang dan jasa serta belanja bantuan sosial. Pengurangan alokasi belanja tersebut dialihkan ke anggaran belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa.

Secara parsial, proporsi antara belanja tidak langsung dan belanja langsung terlihat hampir berimbang, yaitu sebesar 53 dan 47 persen. Realisasi belanja pegawai menyerap sebagian besar anggaran belanja daerah, yaitu mencapai 36 persen. Secara implisit memberikan gambaran bahwa pemerintah daerah telah memiliki banyak sumberdaya manusia yang handal untuk membantu program dan kegiatan pembangunan sampai ke wilayah desa dan dusun. Diharapkan dengan sumberdaya yang ada hasil pembangunan daerah akan dicapai sesuai target.

Realisasi belanja tidak terduga tahun 2016 cukup besar, yaitu mencapai 346 miliar rupiah. Apabila disandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya terlihat sangat jauh. Tahun 2015 realisasi belanja tidak terduga hanya sebesar 98 juta rupiah.

**Grafik 3.7.1.**  
**Struktur Anggaran Belanja Terhadap Total Belanja Daerah**  
**Tahun 2015 – 2016 (persen)**



Struktur alokasi belanja daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2016 tidak berbeda jauh dengan tahun sebelumnya. Proporsi tiap komponen belanja daerah pun hampir sama selama 2 tahun terakhir. Adanya pengurangan proporsi anggaran belanja modal sebanyak 4 persen pada tahun 2016, yang akhirnya digunakan untuk menambah proporsi belanja lainnya.

Struktur belanja daerah secara keseluruhan akan memberikan gambaran mengenai arah kebijakan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Diharapkan dengan penentuan prioritas pembangunan yang lebih baik serta diiringi dengan tata kelola anggaran yang cermat akan mampu memberikan kemampuan daerah untuk mencapai sasaran pembangunan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.

### **3.8. Indeks Pembangunan Manusia**

IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata geometrik dari tiga indeks yang terdiri dari indeks harapan hidup, indeks pendidikan, serta indeks standar hidup layak.

Angka harapan hidup waktu lahir (*expectation of life at birth*) yang biasanya dilambangkan dengan simbol *eo* dan sering disingkat dengan AHH adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir.

**Tabel 3.8.1.**  
**Angka Harapan Hidup ( *eo* ) Penduduk Kabupaten Sidoarjo**  
**Tahun 2011 - 2016**

Tahun	Angka Harapan Hidup (Tahun)
[1]	[2]
2011	73,42
2012	73,42
2013	73,43
2014	73,43
2015	73,63
2016	73,67

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Sidoarjo

Rata-rata lama sekolah (MYS) dihitung dari jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Angka ini memiliki asumsi bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun.

Angka harapan bersekolah (IYS) merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Penduduk yang dicakup dalam angka harapan sekolah adalah penduduk usia 7 tahun ke atas. Hal ini disesuaikan dengan program wajib belajar 9 tahun yang dimulai pada usia 7 tahun. Angka ini memiliki asumsi kemungkinan anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan rasio penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

**Tabel 3.8.2.**  
**Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Bersekolah**  
**di Kabupaten Sidoarjo**  
**Tahun 2011-2016**

Tahun	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	Harapan Lama Bersekolah
(1)	(2)	(3)
2011	9,50	12,42
2012	9,70	12,54
2013	10,03	13,25
2014	10,09	13,55
2015	10,10	13,89
<b>2016</b>	<b>10,22</b>	<b>14,13</b>

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Sidoarjo

Standar hidup layak diproksi dengan indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan didekati dengan membagi pengeluaran per kapita riil dengan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity*). Paritas Daya Beli merupakan indikator ekonomi yang digunakan untuk melakukan perbandingan harga-harga riil antar wilayah.

**Tabel 3.8.3.**  
**Pengeluaran Perkapita Yang Disesuaikan Kabupaten Sidoarjo**  
**Tahun 2011 – 2016**

Tahun	Ribu Rupiah/ Orang/ Tahun
[1]	[2]
2011	12.095
2012	12.457
2013	12.602
2014	12.632
2015	12.879
<b>2016</b>	<b>13.320</b>

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Sidoarjo

IPM Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2016 adalah sebesar 78,17. Besaran IPM ini tergolong dalam IPM menengah atas, yaitu sesuai dengan acuan UNDP.

**Tabel 3.8.4.**  
**IPM metode Baru dan Komponennya di Kabupaten Sidoarjo**  
**Tahun 2016**

Komponen	Skor	Indeks
(1)	(2)	(3)
1. Angka Harapan Hidup ( $e_0$ /Tahun)	73,67	0,83
2. Harapan Lama Sekolah (Persen)	14,13	0,73
Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	10,22	
3. Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (Ribuan Rupiah)	13.320	0,79
<b>IPM</b>	<b>78,17</b>	

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Sidoarjo

Dalam cakupan Jawa Timur, besaran IPM Kabupaten Sidoarjo selama sepuluh tahun terakhir stabil berada pada peringkat keempat. Kota Malang dalam 3 tahun terakhir menduduki peringkat teratas; menggeser Kota Surabaya dan Kota Madiun. Besaran angka IPM Kota Madiun berbeda tipis dengan Kota Surabaya, peringkat ketiga dan kedua se Jawa Timur.

**Tabel 3.8.5.**  
**Posisi Angka IPM Metode Baru Kabupaten Sidoarjo**  
**Dibandingkan Beberapa Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur**  
**Tahun 2016**

No.	Kabupaten/Kota	Angka IPM	Peringkat
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kota Malang	80,46	1
2.	Kota Surabaya	80,38	2
3.	Kota Madiun	80,01	3
<b>4.</b>	<b>Kabupaten Sidoarjo</b>	<b>78,17</b>	<b>4</b>
	Provinsi Jawa Timur	69,74	

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Sidoarjo

Besaran angka IPM saat ini tidak mutlak merefleksikan keberhasilan suatu periode pemerintahan. IPM yang rendah bisa saja karena di suatu kabupaten/kota secara historis angkanya memang rendah. Keberhasilan suatu periode pemerintahan bisa dengan menyandingkan angka PDRB dan besaran IPM pada tahun yang bersangkutan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Pembangunan ekonomi merupakan serangkaian usaha bersama antara pemerintah, swasta serta masyarakat untuk mencapai tumjuan peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut, pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah menetapkan visi, misi dan strategi pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) maupun Jangka Menengah.

Pembangunan harus dilaksanakan secara berkesinambungan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Diperlukan perencanaan dan penentuan prioritas pembangunan, monitoring dari proses pembangunan yang sedang berlangsung maupun evaluasi hasil yang pembangunan yang telah dicapai secara terus-menerus untuk lebih mempercepat pencapaian tujuan pembangunan itu sendiri. Pengumpulan berbagai indikator pembangunan menjadi dasar dari evaluasi hasil yang telah dicapai maupun untuk perencanaan pembangunan selanjutnya.

Beberapa indikator ekonomi yang ada di Kabupaten Sidoarjo tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Percepatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo tahun 2016 sebesar 5,51 persen, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 5,24 persen.
2. Tiga sektor ekonomi yang selalu dominan kontribusinya di Kabupaten Sidoarjo yaitu: industri pengolahan; perdagangan, hotel dan restoran serta pengangkutan dan komunikasi. Ketiga sektor tersebut telah menjadi tulang punggung bagi perekonomian di Sidoarjo karena kontribusinya yang sangat tinggi (74,14 persen).
3. Laju inflasi Kabupaten Sidoarjo pada akhir tahun 2016 sebesar 3,03 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 3,15 persen (yoy).



4. Gini rasio kabupaten Sidoarjo selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir berada pada kisaran 0.30, dalam arti bahwa Kabupaten Sidoarjo masuk dalam kategori ketimpangan distribusi pendapatan *rendah*.
5. Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2016 mencapai 3,6 triliun rupiah, bertambah sekitar 100 milyar rupiah dari tahun sebelumnya.
6. Pendapatan Asli Daerah mampu penyumbang 36 persen terhadap pendapatan daerah Kabupaten Sidoarjo. Dalam lingkup Jawa Timur, capaian realisasi PAD Kabupaten Sidoarjo tahun 2016 merupakan tertinggi diantara 38 kabupaten/kota, sebesar 108,54 persen.
7. Realisasi belanja pegawai menyerap sebagian besar anggaran belanja daerah, yaitu mencapai 36 persen.
8. IPM Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2016 adalah sebesar 78,17. Besaran IPM ini tergolong dalam IPM menengah atas.

# LAMPIRAN

## 1. PDRB SERI 2010 ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA (JUTA RUPIAH)

Kategori	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>A</b>	<b>Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan</b>	<b>2.490.420,4</b>	<b>2.797.475,7</b>	<b>3.140.355,0</b>	<b>3.559.687,4</b>	<b>3.817.607,9</b>
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	1.016.972,3	1.042.756,4	1.127.903,7	1.263.384,8	1.324.716,5
	a. Tanaman Pangan	547.236,5	575.932,3	644.906,5	725.944,4	746.950,5
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	12.174,3	10.023,2	10.902,6	11.717,4	13.683,7
	c. Perkebunan Semusim	180.222,3	175.531,8	163.616,7	176.321,4	182.511,1
	d. Peternakan	17.422,4	11.709,0	11.857,6	12.936,7	13.960,0
	e. Jasa Pertanian dan Perburuan	168,1	124,3	120,3	130,9	135,1
	f. Peternakan	249.208,2	258.917,7	284.864,8	323.154,1	353.252,1
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	10.540,5	10.518,0	11.635,1	13.180,0	14.224,0
2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	842,2	859,7	817,3	882,7	805,7
3	Perikanan	1.472.605,9	1.753.859,6	2.011.634,0	2.295.419,9	2.492.085,7
<b>B</b>	<b>Pertambangan dan Penggalian</b>	<b>178.444,5</b>	<b>177.235,7</b>	<b>208.062,9</b>	<b>139.475,0</b>	<b>141.810,4</b>
1	Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	161.374,4	160.941,0	191.072,6	120.718,9	122.052,7
2	Pertambangan Batubara dan Lignit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Pertambangan Bijih Logam	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Pertambangan dan Penggalian Lainnya	17.070,2	16.294,7	16.990,3	18.756,1	19.757,7
<b>C</b>	<b>Industri Pengolahan</b>	<b>51.121.458,7</b>	<b>55.288.666,8</b>	<b>61.953.538,6</b>	<b>68.562.265,5</b>	<b>73.636.756,4</b>
1	Industri Batubara dan Pengilangan Migas	2.912,5	3.475,9	3.666,6	3.854,8	3.893,8
2	Industri Makanan dan Minuman	17.338.733,3	18.995.868,3	21.637.128,3	25.135.967,5	28.489.029,4
3	Pengolahan Tembakau	367.090,4	408.442,6	403.106,9	442.804,9	487.051,7
4	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	457.503,2	491.353,8	523.782,9	565.344,2	617.315,7
5	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	1.691.968,5	1.924.931,4	2.153.669,6	2.413.353,9	2.630.234,9
6	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	289.012,6	315.628,8	348.353,4	360.095,5	358.801,5
7	Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	10.025.530,7	9.955.531,9	10.540.411,5	11.531.606,9	12.386.747,2
8	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	5.842.137,0	6.626.296,9	7.667.445,6	8.464.948,2	8.332.265,1
9	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	2.057.857,2	2.106.897,3	2.256.994,7	2.368.186,4	2.334.179,6
10	Industri Barang Galian bukan Logam	660.992,6	693.760,1	787.382,5	870.883,6	877.945,1
11	Industri Logam Dasar	5.543.085,6	6.180.461,0	7.235.011,9	7.138.393,3	7.592.424,8
12	Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	3.533.010,0	4.052.010,8	4.447.529,9	5.029.394,6	5.108.630,7
13	Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	89.839,3	98.542,1	112.153,4	120.044,6	127.614,8
14	Industri Alat Angkutan	812.637,6	858.614,1	904.586,4	976.752,3	1.014.916,0
15	Industri Furnitur	2.023.820,8	2.186.391,0	2.507.666,7	2.700.821,4	2.818.709,1
16	Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	385.327,4	390.460,7	424.648,4	439.813,3	456.997,1

Kategori	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>D</b>	<b>Pengadaan Listrik dan Gas</b>	<b>1.527.926,7</b>	<b>1.483.861,7</b>	<b>1.655.326,1</b>	<b>1.703.576,4</b>	<b>1.727.111,9</b>
	1 Ketenagalistrikan	60.940,8	62.478,9	70.540,5	75.206,2	80.337,0
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	1.466.985,9	1.421.382,7	1.584.785,7	1.628.370,2	1.646.774,9
<b>E</b>	<b>Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang</b>	<b>80.490,5</b>	<b>85.028,5</b>	<b>88.478,0</b>	<b>96.413,1</b>	<b>104.511,1</b>
<b>F</b>	<b>Konstruksi</b>	<b>9.758.567,4</b>	<b>10.834.313,0</b>	<b>12.117.757,6</b>	<b>13.228.282,5</b>	<b>14.597.002,9</b>
<b>G</b>	<b>Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor</b>	<b>16.561.205,8</b>	<b>19.104.483,3</b>	<b>20.810.686,0</b>	<b>23.055.489,7</b>	<b>25.623.446,5</b>
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	5.425.474,0	6.504.101,7	7.041.088,8	7.824.588,4	8.477.467,5
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	11.135.731,8	12.600.381,7	13.769.597,2	15.230.901,3	17.145.979,0
<b>H</b>	<b>Transportasi dan Pergudangan</b>	<b>10.556.138,6</b>	<b>12.844.984,2</b>	<b>15.075.772,8</b>	<b>17.095.795,3</b>	<b>19.623.165,4</b>
	1 Angkutan Rel	4.689,9	4.543,1	5.664,3	7.281,8	8.571,1
	2 Angkutan Darat	608.520,3	659.567,9	728.033,5	824.430,9	937.003,8
	3 Angkutan Laut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	1.035,9	1.112,7	1.186,4	1.274,4	1.383,5
	5 Angkutan Udara	9.049.032,2	11.135.168,6	13.212.062,5	15.047.037,6	17.360.316,4
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	892.860,3	1.044.591,9	1.128.826,1	1.215.770,5	1.315.890,6
<b>I</b>	<b>Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum</b>	<b>3.255.114,5</b>	<b>3.639.973,4</b>	<b>4.153.252,2</b>	<b>4.763.893,6</b>	<b>5.453.140,9</b>
	1 Penyediaan Akomodasi	60.424,7	69.344,9	82.468,8	89.955,3	99.261,1
	2 Penyediaan Makan Minum	3.194.689,8	3.570.628,5	4.070.783,4	4.673.938,3	5.353.879,8
<b>J</b>	<b>Informasi dan Komunikasi</b>	<b>3.814.503,4</b>	<b>4.194.463,5</b>	<b>4.573.050,0</b>	<b>5.036.600,2</b>	<b>5.588.594,7</b>
<b>K</b>	<b>Jasa Keuangan dan Asuransi</b>	<b>1.224.105,6</b>	<b>1.450.763,1</b>	<b>1.624.148,0</b>	<b>1.846.582,1</b>	<b>2.053.165,5</b>
	1 Jasa Perantara Keuangan	725.383,9	876.360,4	975.143,8	1.116.065,3	1.228.227,5
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	125.360,1	148.239,7	168.479,0	192.343,8	214.484,0
	3 Jasa Keuangan Lainnya	371.549,2	424.027,5	478.187,7	535.587,9	607.538,0
	4 Jasa Penunjang Keuangan	1.812,4	2.135,5	2.337,5	2.585,1	2.916,0
<b>L</b>	<b>Real Estate</b>	<b>967.728,8</b>	<b>1.070.075,0</b>	<b>1.159.633,7</b>	<b>1.335.786,4</b>	<b>1.471.788,8</b>
<b>M,N</b>	<b>Jasa Perusahaan</b>	<b>170.279,8</b>	<b>188.960,6</b>	<b>206.260,1</b>	<b>229.403,1</b>	<b>253.008,7</b>
<b>O</b>	<b>Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib</b>	<b>2.214.276,2</b>	<b>2.390.513,5</b>	<b>2.433.970,1</b>	<b>2.666.419,6</b>	<b>2.942.523,5</b>
<b>P</b>	<b>Jasa Pendidikan</b>	<b>1.215.469,2</b>	<b>1.398.427,6</b>	<b>1.557.645,7</b>	<b>1.766.932,4</b>	<b>1.913.687,9</b>
<b>Q</b>	<b>Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial</b>	<b>315.864,3</b>	<b>357.426,3</b>	<b>405.537,4</b>	<b>455.187,8</b>	<b>492.318,2</b>
<b>R,S, T,U</b>	<b>Jasa lainnya</b>	<b>403.904,9</b>	<b>436.599,5</b>	<b>482.353,9</b>	<b>539.099,6</b>	<b>581.012,7</b>
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>105.855.899,4</b>	<b>117.743.251,5</b>	<b>131.645.828,1</b>	<b>146.080.889,7</b>	<b>160.020.653,4</b>
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS</b>		<b>105.691.612,6</b>	<b>117.578.834,6</b>	<b>131.451.088,9</b>	<b>145.956.315,9</b>	<b>159.894.706,9</b>

## 2. PDRB SERI 2010 ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA (JUTA RUPIAH)

Kategori	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>A</b>	<b>Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan</b>	<b>2.171.333,3</b>	<b>2.290.735,0</b>	<b>2.396.800,3</b>	<b>2.509.247,0</b>	<b>2.604.215,9</b>
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	886.859,1	859.486,3	866.231,3	892.383,3	904.522,3
	a. Tanaman Pangan	471.004,8	454.823,9	472.215,3	492.868,3	496.504,9
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	10.853,0	8.720,8	8.907,6	9.108,8	9.490,5
	c. Perkebunan Semusim	160.372,7	154.793,0	140.872,0	141.139,6	139.629,4
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	16.758,5	10.740,8	9.575,5	9.859,9	10.228,6
	e. Perkebunan Tahunan	142,2	99,4	87,1	87,9	87,1
	f. Peternakan	218.211,7	221.353,6	225.688,9	230.225,3	239.319,2
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	9.516,2	8.955,0	8.884,9	9.093,5	9.262,6
2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	731,6	711,5	596,7	601,0	516,6
3	Perikanan	1.283.742,6	1.430.537,2	1.529.972,3	1.616.262,7	1.699.177,0
<b>B</b>	<b>Pertambangan dan Penggalian</b>	<b>153.348,4</b>	<b>131.913,5</b>	<b>151.770,0</b>	<b>139.257,4</b>	<b>146.551,9</b>
1	Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	137.526,3	117.419,5	138.220,0	125.372,7	132.418,6
2	Pertambangan Batubara dan Lignit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Pertambangan Bijih Logam	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Pertambangan dan Penggalian Lainnya	15.822,1	14.494,0	13.550,0	13.884,7	14.133,3
<b>C</b>	<b>Industri Pengolahan</b>	<b>46.274.825,2</b>	<b>49.174.800,1</b>	<b>52.756.515,1</b>	<b>55.755.893,3</b>	<b>58.304.852,4</b>
1	Industri Batubara dan Pengilangan Migas	2.647,1	2.808,9	2.878,5	2.928,1	2.902,1
2	Industri Makanan dan Minuman	15.079.581,6	15.956.842,3	17.313.812,3	19.088.478,1	20.800.714,5
3	Pengolahan Tembakau	310.272,1	314.166,0	309.888,2	321.058,2	340.835,4
4	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	407.497,6	417.338,7	427.810,1	447.861,3	472.404,1
5	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	1.416.508,1	1.489.599,9	1.587.973,1	1.669.492,1	1.775.838,7
6	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	254.009,4	257.540,1	264.467,9	261.753,2	256.125,5
7	Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	9.316.418,1	9.092.824,1	9.112.328,2	9.574.166,8	10.063.754,6
8	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	5.236.034,2	5.930.332,3	6.580.059,5	6.963.085,0	6.774.009,4
9	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	1.973.120,3	2.011.965,8	2.140.128,1	2.211.037,7	2.163.279,3
10	Industri Barang Galian bukan Logam	639.002,7	668.532,4	682.197,2	713.100,7	705.755,8
11	Industri Logam Dasar	5.210.659,2	6.097.983,8	7.051.586,5	6.913.375,4	7.267.340,2
12	Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	3.311.724,9	3.685.366,7	3.897.068,7	4.136.730,5	4.180.166,2
13	Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	79.323,6	80.047,0	81.652,0	83.721,5	86.182,9
14	Industri Alat Angkutan	753.113,9	791.763,7	829.368,5	857.038,5	872.293,8
15	Industri Furnitur	1.909.426,6	2.000.979,2	2.075.717,2	2.105.973,6	2.128.507,5
16	Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	375.485,9	376.709,2	399.579,1	406.092,5	414.742,2

Kategori	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>D</b>	<b>Pengadaan Listrik dan Gas</b>	<b>1.006.928,1</b>	<b>1.102.647,8</b>	<b>1.183.333,4</b>	<b>1.144.906,1</b>	<b>1.123.396,6</b>
	1 Ketenagalistrikan	66.595,3	71.409,4	76.186,8	77.506,1	80.234,4
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	940.332,8	1.031.238,4	1.107.146,6	1.067.400,0	1.043.162,3
<b>E</b>	<b>Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang</b>	<b>78.935,4</b>	<b>82.298,1</b>	<b>83.870,2</b>	<b>87.381,8</b>	<b>90.929,5</b>
<b>F</b>	<b>Konstruksi</b>	<b>8.593.268,9</b>	<b>9.173.870,6</b>	<b>9.786.087,7</b>	<b>10.144.358,6</b>	<b>10.747.947,9</b>
<b>G</b>	<b>Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor</b>	<b>14.722.826,5</b>	<b>16.091.374,2</b>	<b>17.142.349,4</b>	<b>17.938.334,2</b>	<b>19.059.369,7</b>
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	4.944.708,7	5.415.625,2	5.806.732,4	5.939.246,0	6.183.752,8
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	9.778.117,8	10.675.749,0	11.335.617,0	11.999.088,3	12.875.616,9
<b>H</b>	<b>Transportasi dan Pergudangan</b>	<b>8.175.051,2</b>	<b>8.642.230,7</b>	<b>8.691.655,6</b>	<b>9.150.104,3</b>	<b>9.833.803,0</b>
	1 Angkutan Rel	3.394,7	2.841,5	3.025,7	3.343,3	3.710,1
	2 Angkutan Darat	596.443,4	621.653,9	664.817,2	714.372,9	784.310,0
	3 Angkutan Laut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	953,8	969,3	993,3	1.011,7	1.034,5
	5 Angkutan Udara	6.801.254,5	7.158.294,7	7.162.518,2	7.540.487,6	8.125.885,7
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	773.004,8	858.471,2	860.301,2	890.888,8	918.862,7
<b>I</b>	<b>Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum</b>	<b>2.924.487,7</b>	<b>3.135.879,7</b>	<b>3.418.655,9</b>	<b>3.694.810,5</b>	<b>4.023.275,2</b>
	1 Penyediaan Akomodasi	53.482,9	57.634,9	62.035,9	66.270,9	71.678,6
	2 Penyediaan Makan Minum	2.871.004,8	3.078.244,8	3.356.620,0	3.628.539,6	3.951.596,5
<b>J</b>	<b>Informasi dan Komunikasi</b>	<b>3.722.730,7</b>	<b>4.081.899,7</b>	<b>4.438.616,9</b>	<b>4.744.060,7</b>	<b>5.132.599,2</b>
<b>K</b>	<b>Jasa Keuangan dan Asuransi</b>	<b>1.050.433,6</b>	<b>1.181.141,4</b>	<b>1.259.476,8</b>	<b>1.347.523,6</b>	<b>1.446.719,9</b>
	1 Jasa Perantara Keuangan	602.371,3	681.727,7	734.064,0	792.642,3	851.773,4
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	108.212,2	121.999,5	131.173,9	140.243,9	147.354,2
	3 Jasa Keuangan Lainnya	338.246,6	375.617,0	392.383,5	412.708,9	445.519,3
	4 Jasa Penunjang Keuangan	1.603,4	1.797,1	1.855,5	1.928,6	2.073,0
<b>L</b>	<b>Real Estate</b>	<b>900.907,6</b>	<b>956.403,5</b>	<b>1.021.247,7</b>	<b>1.079.859,7</b>	<b>1.154.478,0</b>
<b>M,N</b>	<b>Jasa Perusahaan</b>	<b>150.995,2</b>	<b>158.507,7</b>	<b>169.088,1</b>	<b>177.623,3</b>	<b>187.339,3</b>
<b>O</b>	<b>Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib</b>	<b>1.874.254,6</b>	<b>1.908.216,1</b>	<b>1.932.660,3</b>	<b>1.973.449,4</b>	<b>2.070.543,1</b>
<b>P</b>	<b>Jasa Pendidikan</b>	<b>1.064.227,3</b>	<b>1.160.334,9</b>	<b>1.235.496,0</b>	<b>1.324.621,5</b>	<b>1.405.820,8</b>
<b>Q</b>	<b>Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial</b>	<b>296.662,1</b>	<b>319.223,3</b>	<b>348.509,2</b>	<b>366.262,0</b>	<b>387.725,0</b>
<b>R,S, T,U</b>	<b>Jasa lainnya</b>	<b>382.655,3</b>	<b>401.045,7</b>	<b>418.152,0</b>	<b>435.166,2</b>	<b>459.622,6</b>
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>93.543.871,0</b>	<b>99.992.521,9</b>	<b>106.434.284,6</b>	<b>112.012.859,7</b>	<b>118.179.189,9</b>
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS</b>		<b>93.403.697,5</b>	<b>99.872.293,5</b>	<b>106.293.186,1</b>	<b>111.884.558,9</b>	<b>118.043.869,2</b>

### 3.DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB SERI 2010 MENURUT LAPANGAN USAHA (PERSEN)

Kategori	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>A</b>	<b>Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan</b>	<b>2,35</b>	<b>2,38</b>	<b>2,39</b>	<b>2,44</b>	<b>2,39</b>
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	0,96	0,89	0,86	0,86	0,83
	a. Tanaman Pangan	0,52	0,49	0,49	0,50	0,47
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	c. Perkebunan Semusim	0,17	0,15	0,12	0,12	0,11
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
	e. Perkebunan Tahunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f. Peternakan	0,24	0,22	0,22	0,22	0,22
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Perikanan	1,39	1,49	1,53	1,57	1,56
<b>B</b>	<b>Pertambangan dan Penggalian</b>	<b>0,17</b>	<b>0,15</b>	<b>0,16</b>	<b>0,10</b>	<b>0,09</b>
1	Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	0,15	0,14	0,15	0,08	0,08
2	Pertambangan Batubara dan Lignit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pertambangan Bijih Logam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pertambangan dan Penggalian Lainnya	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
<b>C</b>	<b>Industri Pengolahan</b>	<b>48,29</b>	<b>46,96</b>	<b>47,06</b>	<b>46,93</b>	<b>46,02</b>
1	Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Industri Makanan dan Minuman	16,38	16,13	16,44	17,21	17,80
3	Pengolahan Tembakau	0,35	0,35	0,31	0,30	0,30
4	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	0,43	0,42	0,40	0,39	0,39
5	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	1,60	1,63	1,64	1,65	1,64
6	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	0,27	0,27	0,26	0,25	0,22
7	Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	9,47	8,46	8,01	7,89	7,74
8	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	5,52	5,63	5,82	5,79	5,21
9	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	1,94	1,79	1,71	1,62	1,46
10	Industri Barang Galian bukan Logam	0,62	0,59	0,60	0,60	0,55
11	Industri Logam Dasar	5,24	5,25	5,50	4,89	4,74
12	Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	3,34	3,44	3,38	3,44	3,19
13	Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	0,08	0,08	0,09	0,08	0,08
14	Industri Alat Angkutan	0,77	0,73	0,69	0,67	0,63
15	Industri Furnitur	1,91	1,86	1,90	1,85	1,76
16	Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	0,36	0,33	0,32	0,30	0,29

Kategori	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>D</b>	<b>Pengadaan Listrik dan Gas</b>	<b>1,44</b>	<b>1,26</b>	<b>1,26</b>	<b>1,17</b>	<b>1,08</b>
	1 Ketenagalistrikan	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	1,39	1,21	1,20	1,11	1,03
<b>E</b>	<b>Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang</b>	<b>0,08</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>
<b>F</b>	<b>Konstruksi</b>	<b>9,22</b>	<b>9,20</b>	<b>9,20</b>	<b>9,06</b>	<b>9,12</b>
<b>G</b>	<b>Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor</b>	<b>15,65</b>	<b>16,23</b>	<b>15,81</b>	<b>15,78</b>	<b>16,01</b>
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	5,13	5,52	5,35	5,36	5,30
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	10,52	10,70	10,46	10,43	10,71
<b>H</b>	<b>Transportasi dan Pergudangan</b>	<b>9,97</b>	<b>10,91</b>	<b>11,45</b>	<b>11,70</b>	<b>12,26</b>
	1 Angkutan Rel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	2 Angkutan Darat	0,57	0,56	0,55	0,56	0,59
	3 Angkutan Laut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 Angkutan Udara	8,55	9,46	10,04	10,30	10,85
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	0,84	0,89	0,86	0,83	0,82
<b>I</b>	<b>Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum</b>	<b>3,08</b>	<b>3,09</b>	<b>3,15</b>	<b>3,26</b>	<b>3,41</b>
	1 Penyediaan Akomodasi	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
	2 Penyediaan Makan Minum	3,02	3,03	3,09	3,20	3,35
<b>J</b>	<b>Informasi dan Komunikasi</b>	<b>3,60</b>	<b>3,56</b>	<b>3,47</b>	<b>3,45</b>	<b>3,49</b>
<b>K</b>	<b>Jasa Keuangan dan Asuransi</b>	<b>1,16</b>	<b>1,23</b>	<b>1,23</b>	<b>1,26</b>	<b>1,28</b>
	1 Jasa Perantara Keuangan	0,69	0,74	0,74	0,76	0,77
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13
	3 Jasa Keuangan Lainnya	0,35	0,36	0,36	0,37	0,38
	4 Jasa Penunjang Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>L</b>	<b>Real Estate</b>	<b>0,91</b>	<b>0,91</b>	<b>0,88</b>	<b>0,91</b>	<b>0,92</b>
<b>M,N</b>	<b>Jasa Perusahaan</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>
<b>O</b>	<b>Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib</b>	<b>2,09</b>	<b>2,03</b>	<b>1,85</b>	<b>1,83</b>	<b>1,84</b>
<b>P</b>	<b>Jasa Pendidikan</b>	<b>1,15</b>	<b>1,19</b>	<b>1,18</b>	<b>1,21</b>	<b>1,20</b>
<b>Q</b>	<b>Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial</b>	<b>0,30</b>	<b>0,30</b>	<b>0,31</b>	<b>0,31</b>	<b>0,31</b>
<b>R,S, T,U</b>	<b>Jasa lainnya</b>	<b>0,38</b>	<b>0,37</b>	<b>0,37</b>	<b>0,37</b>	<b>0,36</b>
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS</b>		<b>99,84</b>	<b>99,86</b>	<b>99,85</b>	<b>99,91</b>	<b>99,92</b>



#### 4. LAJU PERTUMBUHAN PDRB SERI 2010 MENURUT LAPANGAN USAHA (PERSEN)

Kategori	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>A</b>	<b>Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan</b>	<b>9,20</b>	<b>5,50</b>	<b>4,63</b>	<b>4,69</b>	<b>3,78</b>
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	9,38	-3,09	0,78	3,02	1,36
	a. Tanaman Pangan	11,51	-3,44	3,82	4,37	0,74
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	39,58	-19,65	2,14	2,26	4,19
	c. Perkebunan Semusim	14,46	-3,48	-8,99	0,19	-1,07
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	-29,70	-35,91	-10,85	2,97	3,74
	e. Perkebunan Tahunan	-22,83	-30,10	-12,41	0,98	-0,96
	f. Peternakan	4,71	1,44	1,96	2,01	3,95
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	17,81	-5,90	-0,78	2,35	1,86
2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	5,87	-2,75	-16,13	0,72	-14,04
3	Perikanan	9,08	11,43	6,95	5,64	5,13
<b>B</b>	<b>Pertambangan dan Penggalian</b>	<b>2,43</b>	<b>-13,98</b>	<b>15,05</b>	<b>-8,24</b>	<b>5,24</b>
1	Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	3,31	-14,62	17,71	-9,29	5,62
2	Pertambangan Batubara dan Lignit					
3	Pertambangan Bijih Logam					
4	Pertambangan dan Penggalian Lainnya	-4,66	-8,39	-6,51	2,47	1,79
<b>C</b>	<b>Industri Pengolahan</b>	<b>6,27</b>	<b>6,27</b>	<b>7,28</b>	<b>5,69</b>	<b>4,57</b>
1	Industri Batubara dan Pengilangan Migas	-3,41	6,11	2,48	1,72	-0,89
2	Industri Makanan dan Minuman	4,01	5,82	8,50	10,25	8,97
3	Pengolahan Tembakau	0,41	1,26	-1,36	3,60	6,16
4	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	3,00	2,41	2,51	4,69	5,48
5	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	2,09	5,16	6,60	5,13	6,37
6	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	0,22	1,39	2,69	-1,03	-2,15
7	Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	0,51	-2,40	0,21	5,07	5,11
8	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	23,73	13,26	10,96	5,82	-2,72
9	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	9,94	1,97	6,37	3,31	-2,16
10	Industri Barang Galian bukan Logam	5,28	4,62	2,04	4,53	-1,03
11	Industri Logam Dasar	5,54	17,03	15,64	-1,96	5,12
12	Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	17,07	11,28	5,74	6,15	1,05
13	Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	1,38	0,91	2,01	2,53	2,94
14	Industri Alat Angkutan	2,27	5,13	4,75	3,34	1,78
15	Industri Furnitur	3,75	4,79	3,74	1,46	1,07
16	Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	0,31	0,33	6,07	1,63	2,13

Kategori	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>D</b>	<b>Pengadaan Listrik dan Gas</b>	<b>3,86</b>	<b>9,51</b>	<b>7,32</b>	<b>-3,25</b>	<b>-1,88</b>
	1 Ketenagalistrikan	13,91	7,23	6,69	1,73	3,52
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	3,21	9,67	7,36	-3,59	-2,27
<b>E</b>	<b>Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang</b>	<b>3,38</b>	<b>4,26</b>	<b>1,91</b>	<b>4,19</b>	<b>4,06</b>
<b>F</b>	<b>Konstruksi</b>	<b>6,16</b>	<b>6,76</b>	<b>6,67</b>	<b>3,66</b>	<b>5,95</b>
<b>G</b>	<b>Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor</b>	<b>9,29</b>	<b>9,30</b>	<b>6,53</b>	<b>4,64</b>	<b>6,25</b>
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	9,81	9,52	7,22	2,28	4,12
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	9,03	9,18	6,18	5,85	7,30
<b>H</b>	<b>Transportasi dan Pergudangan</b>	<b>9,22</b>	<b>5,71</b>	<b>0,57</b>	<b>5,27</b>	<b>7,47</b>
	1 Angkutan Rel	-7,54	-16,29	6,48	10,50	10,97
	2 Angkutan Darat	4,16	4,23	6,94	7,45	9,79
	3 Angkutan Laut					
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	1,89	1,63	2,48	1,85	2,26
	5 Angkutan Udara	9,21	5,25	0,06	5,28	7,76
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	13,58	11,06	0,21	3,56	3,14
<b>I</b>	<b>Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum</b>	<b>7,35</b>	<b>7,23</b>	<b>9,02</b>	<b>8,08</b>	<b>8,89</b>
	1 Penyediaan Akomodasi	7,39	7,76	7,64	6,83	8,16
	2 Penyediaan Makan Minum	7,35	7,22	9,04	8,10	8,90
<b>J</b>	<b>Informasi dan Komunikasi</b>	<b>12,14</b>	<b>9,65</b>	<b>8,74</b>	<b>6,88</b>	<b>8,19</b>
<b>K</b>	<b>Jasa Keuangan dan Asuransi</b>	<b>13,07</b>	<b>12,44</b>	<b>6,63</b>	<b>6,99</b>	<b>7,36</b>
	1 Jasa Perantara Keuangan	12,56	13,17	7,68	7,98	7,46
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	9,96	12,74	7,52	6,91	5,07
	3 Jasa Keuangan Lainnya	15,04	11,05	4,46	5,18	7,95
	4 Jasa Penunjang Keuangan	10,66	12,08	3,25	3,94	7,49
<b>L</b>	<b>Real Estate</b>	<b>5,38</b>	<b>6,16</b>	<b>6,78</b>	<b>5,74</b>	<b>6,91</b>
<b>M,N</b>	<b>Jasa Perusahaan</b>	<b>4,35</b>	<b>4,98</b>	<b>6,68</b>	<b>5,05</b>	<b>5,47</b>
<b>O</b>	<b>Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib</b>	<b>1,71</b>	<b>1,81</b>	<b>1,28</b>	<b>2,11</b>	<b>4,92</b>
<b>P</b>	<b>Jasa Pendidikan</b>	<b>9,53</b>	<b>9,03</b>	<b>6,48</b>	<b>7,21</b>	<b>6,13</b>
<b>Q</b>	<b>Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial</b>	<b>8,27</b>	<b>7,60</b>	<b>9,17</b>	<b>5,09</b>	<b>5,86</b>
<b>R,S, T,U</b>	<b>Jasa lainnya</b>	<b>2,96</b>	<b>4,81</b>	<b>4,27</b>	<b>4,07</b>	<b>5,62</b>
	<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>7,26</b>	<b>6,89</b>	<b>6,44</b>	<b>5,24</b>	<b>5,51</b>
	<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS</b>	<b>7,27</b>	<b>6,93</b>	<b>6,43</b>	<b>5,26</b>	<b>5,51</b>

## 5. LAJU INFLASI YEAR ON YEAR (yoy) KABUPATEN SIDOARJO (PERSEN)

Kelompok dan Sub Kelompok Jenis Barang/ Jasa		Des'14- Des'15	Des'15- Des'16
(1)		(2)	(3)
100	BAHAN MAKANAN	(0,93)	(1,85)
101	Padi-padian, umbi-umbian dan hasilnya	7,19	(3,05)
102	Daging dan hasilnya	(7,61)	(17,98)
103	Ikan segar	51,79	16,65
104	Ikan diawetkan	3,59	5,55
105	Telur, susu dan hasilnya	(19,76)	(3,61)
106	Sayru-sayuran	(23,29)	22,61
107	Kacanga-kacangan	(2,56)	22,31
108	Buah-buahan	(9,02)	18,00
109	Bumbu-bumbuan	(35,95)	(32,62)
110	Lemak dan minyak	(17,82)	(62,24)
111	Bahan makanan lainnya	(24,86)	5,37
200	MAK. JADI, MIN, ROKOK, TEMBA.	6,36	5,95
201	Makanan jadi	11,92	4,42
202	Minuman tidak beralkohol	2,64	9,49
203	Tembakau dan minuman beralkohol	(9,45)	6,42
300	PERUMAHAN	14,99	6,46
301	Baiay tempat tinggal	27,03	1,29
302	Bahan bakar, penerangan dan air	1,12	17,48
303	Perlengkapan rumahtangga	8,74	4,29
304	Penyelenggaraan rumahtangga	24,09	7,43
400	SANDANG	5,56	0,87
401	Sandang laki-laki	2,26	1,79
402	Sandang wanita	9,51	2,88
403	Sandang anak-anak	3,23	3,84
404	Barang pribadi dan sandang lainnya	6,74	(2,71)
500	KESEHATAN	8,93	6,32
501	Jasa kesehatan	(4,32)	5,35
502	Obat-obatan	51,83	5,53
503	Jasa perawatan jasmani	(14,32)	4,09
504	Perawatan jasmani dan kosmetika	7,03	7,69
600	PENDIDIKAN, REKREASI DAN OLAHRAGA	2,58	13,13
601	Jasa pendidikan	-	26,56
602	Kursus/ pelatihan	2,53	7,44
603	Perlengkapn/peralatan pendidikan	0,82	5,63
604	Rekreasi	6,83	(0,40)
605	Olahraga	-	2,81
700	TRANS. DAN KOMUNIKASI	0,63	(4,42)
701	Transport	1,02	(5,78)
702	Komunikasi dan pengiriman	-	(4,31)
703	Sarana dan penunjang transport	-	1,95
704	Jasa keuangan	-	2,08
<b>000</b>	<b>Umum</b>	<b>3,15</b>	<b>3,03</b>

# DATA

Mencerdaskan Bangsa